

Laporan Penelitian Dosen IAIN Kudus Tahun 2020

FLUKTUASI INDUSTRI KRETEK DI ERA PANDEMI



Diajukan oleh:

Dr. Abdul Jalil, S.Ag., M.EI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

TAHUN 2020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. 441613
E-Mail: lppm@iainkudus.ac.id Website: www.iainkudus.ac.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 1658/In.37/L1/09/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : H. Mohammad Dzofir, M.Ag
NIP : 197311011999031004
Jabatan : Ketua LPPM

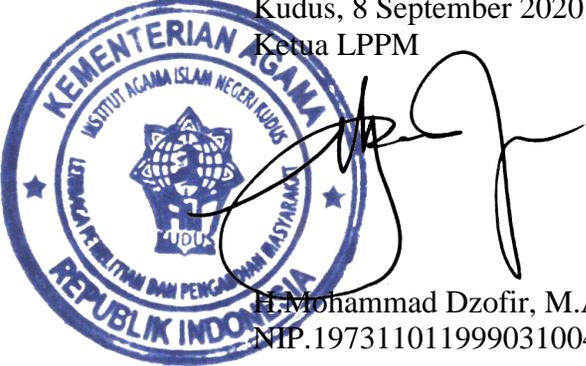
Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Dr. Abdul Jalil, M.E.I
NIP : 197206192000031002
Pangkat/Golongan : Pembina - IV/a

Adalah Dosen IAIN Kudus yang sedang melaksanakan penelitian dengan judul
“FLUKTUASI INDUSTRI KRETEK DI ERA PANDEMI”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 8 September 2020
Ketua LPPM



H. Mohammad Dzofir, M.Ag
NIP.197311011999031004

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Kudus mengesahkan laporan penelitian :

Judul Penelitian : FLUKTUASI INDUSTRI KRETEK DI ERA PANDEMI
Nama : Dr. Abdul Jalil, M.E.I
NIP : 197206192000031002
Pangkat/Golongan : Pembina - IV/a
Program Studi : Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Kudus
Tahun Pelaksanaan : 2020
Biaya : Rp. 10.000.000
Sumber Dana : Mandiri

Kudus, 21 September 2020

Ketua LPPM IAIN Kudus



H. Mohammad Dzofir, M.Ag
NIP. 197311011999031004

DAFTAR ISI

FLUKTUASI INDUSTRI DI ERA PANDEMI; STUDY KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI KUDUS

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Penegasan Judul
- E. Tujuan penelitian
- F. Manfaat
- H. Sistematika Pembatasan

BAB II PERSPEKTIF TEORITIK

- A. Pandemi
- B. Industrialisasi
- C. Fluktuasi
- D. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Paradigma Penelitian dan Pendekatan
- B. Situasi Sosial dan Sample
- C. Sumber Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Analisis Data
- F. Kesimpulan

BAB IV MENGGALI BUDAYA LOKAL BERNUANSIA EKONOMI ISLAM PADA INDUSTRI ROKOK KUDUS

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Historisitas industri kretek di Kudus
- C. Tradisi ekonomi yang bernuansa Islam di Kudus
- D. Peranan Tradisi local dalam menggerakkan industri kretek
- E. Tradisi dan Industri Kretek di era Pandemi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BIBLIOGRAPHY

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mesin uap yang dikembangkan sejak abad 18 telah membawa perubahan besar dalam proses produksi. Tenaga manusia digantikan oleh mesin sehingga kapasitas produksi meningkat pesat. Pada saat itulah industrialisasi, yang menjadi pemicu revolusi industri dimulai. Industrialisasi yang bermula di Eropa ini mendesak dominasi sektor pertanian dalam perekonomian. Para petani meninggalkan sawahnya untuk bekerja di pabrik. Ditambah lagi dengan banyaknya lahan pertanian yang dialihkan menjadi pusat industri baru, yang dengan segera menjadi anak emas perekonomian. Kondisi ini akhirnya menyebar, meski tidak secara merata, ke hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Menjelang pertengahan abad ke-19, Indonesia sudah terbuka terhadap penerapan teknologi tenaga uap. Pada awal 1880-an, mekanisasi industri gula di Jawa hampir lengkap. Pada akhir 1900, Surabaya (bukan Batavia) mempunyai peringkat setara dengan Kalkuta, Bombay, dan Osaka sebagai pusat industri terkemuka di Asia, diikuti oleh Singapura, Bangkok, Hongkong, Shanghai, dan Tokyo dalam skala sedang. Kota-kota pelabuhan utama merupakan pusat-pusat kegiatan manufaktur.

Pada masa orde lama, karir industrialisasi Indonesia tidak begitu nampak. Hal ini tampak selama dasawarsa 1950-an dan awal dasawarsa 1960-an terlihat dari angka sumbangan sektor industri manufaktur kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang pada pertengahan tahun 1960-an masih kurang dari 10%. Walaupun pemerintah Indonesia telah memprakarsai sejumlah proyek industri. Namun kebanyakan proyek tersebut tidak berjalan baik karena selalu kekurangan dana, termasuk juga devisa.

Ketika pemerintah Orde Baru memegang kendali pada tahun 1966, agenda industrialisasi mulai dijalankan. Arah umum kebijakan industri jangka panjang Indonesia ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang di mana industri manufaktur yang kuat dan maju didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.

Untuk menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, pembangunan sektor industri manufaktur dilaksanakan menurut urutan beberapa tahap, yang meliputi empat Repelita pertama, yakni kurun waktu 1969/70-1988/89. Selama Repelita I (1969/70-1973/74) prioritas diberikan pada pembangunan industri-industri manufaktur yang mendukung sektor pertanian, sedangkan selama Repelita II (1974/75-1978/79) prioritas diberikan pada industri pengolahan sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku. Selama Repelita III (1979/80-1983/84) industri-industri yang didirikan adalah yang dapat mengolah bahan baku industri menjadi produk-produk industri manufaktur,

sedangkan selama Repelita IV (1984/85-1988/89) dibangun industri barang-barang hasil rekayasa (barang modal).

Dalam kurun waktu yang relatif tidak lama, transformasi industri ini segera menggeser sektor pertanian sebagai motor utama pertumbuhan. Pada tahun 1967 di awal-awal pemerintahan Orde Baru, kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDB (*Produk Domestik Bruto*) mencapai 51,8%; kemudian pada tahun 1980 sumbangannya sudah menurun menjadi 31,4%, dan mencapai titik terendah pada tahun 1995 di mana peranannya tinggal 16,6%. Sebaliknya untuk industri pengolahan, pada tahun 1967 sumbangannya dalam pembentukan PDB hanya 8,4%, kemudian pada tahun 1980 meningkat menjadi 14,3%, dan tahun 1995 sudah menambah kontribusinya sebesar 23,3%. Pola yang sama juga terjadi pada sektor bangunan dan perdagangan yang semakin meningkat peranannya seiring berjalannya waktu.

Secara umum, strategi industrialisasi yang ditempuh terbagi menjadi 3. *Pertama*, strategi industrialisasi yang mengembangkan industri-industri yang berspektrum luas (*broad-based industry*). Strategi ini lebih menekankan pengembangan industri-industri berbasis impor (*footlose industry*) industri negara lain. Contoh, industri elektronik, tekstil, otomotif, dan lain-lain.

Kedua, strategi industrialisasi yang mengutamakan industri-industri berteknologi canggih berbasis impor (*hi-tech industry*), seperti industri pesawat terbang, industri peralatan dan senjata militer, industri kapal, dan

Iain-lain. *Ketiga*, industri hasil pertanian (*agroindustry*) berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan pembangunan pertanian.

Arah pembangunan nasional tersebut ditangkap secara cerdas oleh masyarakat Kudus. Sejak sebelum Indonesia merdeka, Kudus telah berkiprah di sektor industri dengan icon industri rokok. Maka menjadi tidak aneh jika di era modern ini Kudus secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai kota industri. Pilihan industri sebagai motor penggerak perekonomian warga Kudus secara ekonomi bisa dimaklumi. Sebab, selama ini sektor tersebut telah menjadi primadona.

Memasuki era 1980-an, gelombang globalisasi menerjang seantero dunia, intensitas dan cakupannya menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan. Tidak hanya bidang ekonomi, bisnis, budaya, politik, ideologi, melainkan juga telah menjamah ke tataran *systems, processes, actors, dan events*, sehingga disana melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan.

Di era otonomi, persoalan industri menjadi semakin rumit. Kebijakan pembangunan ekonomi, bagaimanapun juga, membutuhkan investasi untuk pengembangan usaha berskala besar pada sub-sektor unggulan tertentu. Usaha-usaha besar dengan kemampuan modal yang tidak terbatas dari perusahaan nasional ataupun internasional pada gilirannya akan memunculkan persaingan (baca: kesenjangan) dengan usaha kecil dan menengah. Bagaimanapun unggulnya kemampuan usaha kecil dan menengah, mereka tetap saja mereka "bukan lawan" pengusaha besar, apalagi perusahaan-perusahaan trans-nasional (Multinational Corporation, MNCs).

Dalam konteks inilah pemerintah dan pengusaha (terutama rokok) memutar otak untuk menciptakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif adalah bentuk keunggulan nilai produk yang ditentukan oleh produktifitas tenaga kerja. Sementara keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang memperhitungkan semua faktor pokok yang mempengaruhi daya saing suatu perusahaan atau suatu industri. Faktor daya saing itu antara lain adalah persaingan sehat antar industri, adanya diferensiasi produk, dan kemampuan teknologi.

Setelah setengah abad berjuang, akhirnya Kudus menjadi kota kecil di Jawa Tengah yang menjadi kota industri berbasis religiusitas. Slogan yang dimunculkan adalah “kota religius-modern”. Dengan pilihan di atas, tentu Kudus tidak bisa menghindar dari problem industrialisasi, globalisasi, fregmentasi dan religiusitas (*local value*) yang berkembang dan mempengaruhi aktivitas perekonomian.

Pilihan industri sebagai motor penggerak perekonomian warga Kudus secara ekonomi bisa dimaklumi. Sebab, selama ini sektor tersebut telah menjadi primadona, sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

PDRB Berdasarkan Harga Berlaku dan Mata Pencaharian Penduduk Kudus 2007

LAPANGAN USAHA	PDRB		JUMLAH PENDUDUK	
	(JUTAAN RUPIAH)	%	BERDASAR PEKERJAAN	%
Pertanian	517.311,99	2,42	58.269	16,17
Pertambangan & Penggalian	7.347,51	0,03	1.105	0,31
Industri Pengolahan	13.992.851,76	65,33	150.736	41,82
Listrik, Gas & Air Bersih	83.444,04	0,39	1.477	0,41

Bangunan	270.997,53	1,27	34.447	9,56
Perdagangan, Hotel & Restoran	5.332.328,07	24,90	53.070	14,72
Transportasi & Komunikasi	323.498,78	1,51	17.169	4,76
Bank/Lembaga Keuangan lainnya	419.347,63	1,96	4.239	1,18
Jasa-jasa	470.201,23	2,20	39.925	11,08
TOTAL	21.417.328,54	100,00	360.437	100,00

Sumber: Kudus Dalam Angka 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus Tahun 2007, diolah oleh peneliti

Berdasarkan data di atas, Kudus adalah kabupaten yang berbasis pada bidang usaha industri pengolahan (65.33%) dan perdagangan (24,90%). Maka cukup beralasan kiranya jika dua lapangan itu menjadi gantungan hidup bagi masyarakat Kudus. Penduduk Kudus yang menggantungkan hidupnya kepada sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama (150.736 orang, atau 41.82%). Kemudian disusul oleh sektor pertanian pada urutan kedua (58.269 orang, atau 16.17), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada ranking ketiga (53.070 orang, atau 14.72%).

Munculnya fenomena industrialisasi di Kudus, di satu sisi memang cukup menggembirakan karena ketersediaan lapangan kerja yang kompetitif. Akan tetapi, di sisi lain, sangat mengkhawatirkan karena industri yang mendominasi ternyata industri berskala besar yang rawan guncangan. Disamping itu, juga muncul problem ketergantungan.

Tabel 2

Profil Industri Kabupaten Kudus Tahun 2007

NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	INVESTASI	NILAI PRODUKSI
1.	Menengah dan besar	86	142.514	3.514.360,08	67.741.008,971

2.	Kecil	10.146	42.676	252.812,00	2.615.676,169
Total		10.232	185.190	3.766.172,05	70.356.685,140

Sumber : <http://www.kuduskab.go.id/>, data diakses 17 Oktober 2007, diolah peneliti.

Mengingat bahwa jumlah perusahaan di Kudus berjumlah 10.232 unit, ini artinya pemilik perusahaan tidak jauh dari jumlah itu. Dengan kata lain, warga Kudus sebagian besar bekerja pada sektor usaha milik orang lain, menjadi buruh. Tercatat pada tahun 2005, jumlah buruh berjumlah 114.233 orang, meliputi buruh pada perusahaan rokok sekitar 80.000 orang (70%), dan buruh pada perusahaan bukan rokok berjumlah 34.233 orang (30%).

Tabel 2

Jenis-Jenis Industri di Kabupaten Kudus tahun 2008

No.	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	Rokok	225	80.000
2	Jenang	45	390
3	Gula Merah	228	1.995
4	Sirup	44	171
5	Pakaian Jadi	1.381	15.232
6	Bordir	243	3.329
7	Mebel Kayu	324	1.215
8	Alat Pertanian	311	2.328
9	Kertas / Percetakan	62	7.785
10	Elektronik	2	1.788

Sumber: Disperindag Kabupaten Kudus 2008, diolah peneliti

Pada sisi lain, secara kultural, ada dua karakteristik yang melekat pada masyarakat Kudus. *Pertama*, Kudus dipersepsikan sebagai sebuah komunitas yang lekat dengan basis sosial santri-muslim. Dari 724.969 penduduk Kudus, hampir 98 % memeluk agama Islam. *Kedua*, Kudus

dipersepsikan sebagai sebuah kota di Jawa Tengah yang memiliki ciri sosial-ekonomi yang khas; rokok, jenang, soto, bordir, dan beberapa produk lainnya. Tidak berhenti disitu saja, masyarakat Kudus terkenal ulung sebagai pedagang antar kota. Mereka telah terbiasa memasarkan barang dagangannya seperti rokok, bordir dan pakaian jadi berhari-hari bahkan berminggu-minggu ke kota-kota lain, khususnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dua ciri khas Kudus itu, yaitu tradisi santri-muslim yang taat, dan tradisi ekonomi perdagangan dan industri, merupakan fenomena yang menarik dilihat dari antropologi ekonomi, karena adanya unsur sistem nilai yang telah melembaga, hidup, dan mempengaruhi kegiatan ekonomi.¹ Menurut tradisi local, sistem nilai tersebut diyakini merujuk kepada figur Sunan Kudus.²

Local value tersebut memuat pesan nilai tentang perilaku ulet, rajin, dan hemat. Perilaku tersebut merupakan modal dasar dalam berusaha. Bukan mustahil apabila pengusaha-pengusaha Kudus berhasil dalam usahanya. Sebagai ilustrasi, industri milik pribumi di Indonesia sampai tahun 1930-an belum banyak berarti, namun Kudus pada tahun 1910-an telah

¹ Antropologi ekonomi adalah salah satu bidang kajian dalam antropologi social budaya yang memusatkan studinya pada gejala ekonomi dalam kehidupan masyarakat manusia.

² Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung dari perkawinannya dengan Syarifah, putri Sunan Ampel. Sunan Kudus lahir pada pertengahan abad ke-15 TU atau ke-9 H. Ayahnya bernama Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan, Blora. Dalam *Hikayat Hasanuddin* disebutkan bahwa ayah dan anak ini dikenal sebagai ahli agama dan penyebar agama Islam yang gigih. Sunan Kudus, yang bernama asli Amir sebelum akhirnya terkenal dengan nama Ja'far Shadiq, adalah imam kelima Masjid Demak pada akhir masa Sultan Trenggana dan pada awal masa Sultan Prawata. Sunan Kudus pindah dari Demak dan "mendirikan" Kota Kudus setelah ada perbedaan pendapat dengan Sultan Demak dalam penentuan tanggal awal bulan puasa. Najib Hassan, dkk, *Ziarah Spiritual dan Jejak Para Wali* (Jakarta: Kompas, 2006), 219.

terkenal sebagai pusat industri rokok kretek, dan pengusaha pribumi pada waktu itu sangat dominant.³ Karenanya bukan mengherankan pula apabila salah satu karakteristik masyarakat Kudus yang menonjol adalah masyarakat santri muslim yang ulung dalam berdagang dan berusaha.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana halnya jika industri rokok dihadapkan dengan otonomi daerah dan globalisasi (persaingan bebas)? Ternyata, ada yang semakin pesat, ada yang stagnan dan ada yang bangkrut. Lalu, dimana kekuatan dan kelemahan dari tradisi tersebut dilihat dari konteks globalisasi dan otonomi? Seberapa jauh tradisi ekonomi (*local value*) masyarakat muslim Kudus relevan dalam globalisasi? Untuk menjawab beberapa pertanyaan krusial itulah kami melakukan penelitian ini.

D. RUMUSAN MASALAH

Masalah budaya local bernuansa ekonomi Islam industri rokok bisa dikaji dan bersinggungan dengan banyak aspek, seperti ekonomi, politik, sosiologi, antropologi dan lain-lain. Untuk menghindari bias dalam penelitian, kiranya perlu dilakukan penfokusan dan perumusan masalah.

Fokus penelitian ini adalah menggali budaya local yang bernuansa ekonomi Islam dalam kaitannya dengan tarikan globalisasi. Fokus penelitian ini kemudian diturunkan menjadi 5 permasalahan, yakni:

1. Kapan masyarakat Kudus mengenal industri rokok?

³ Pada tahun 1939, derajat keswasembadaan produk rokok dan cerutu menempati posisi nomor 4 dan 5 di Indonesia. The Kian Wee, *Industrialisasi di Indonesia; Beberapa Kajian* (Jakarta: LP3ES, 1994), 16

2. Apakah Kudus memiliki tradisi ekonomi yang bernuansa Islam?
3. Apakah budaya local ikut menggerakkan industri tersebut?
4. Bagaimana fluktuasi industri tersebut di era Pandemi?

F. TUJUAN PENELITIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai fluktuasi industri rokok yang terjadi di kabupaten kudus, yang meliputi Dari sini diharapkan muncul kejelasan tentang kekurangan dan kelebihan model yang telah dilaksanakan, sehingga ke depan dapat dirumuskan konstruk ideal industri rokok di Kudus.

G. MANFAAT PENELITIAN

Sedang manfaat dari penelitian ini adalah, disisi teoritik, akan melahirkan tesa baru yang terbuka untuk dikaji ulang oleh berbagai pihak. Sedang disisi praksisnya adalah memberi alternatif jawaban diantara alternati –alternatif yang lain mengenai teori industrialisasi yang akan diterapkan di Kudus secara khusus, dan di Indonesia secara umum.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Pandemi

Epidemiological transition, secara ringkas, adalah konsep yang menjelaskan perubahan pola distribusi populasi kaitannya dengan perubahan pola mortalitas, fertilitas, harapan hidup, dan penyebab-penyebab kematian (McKeown, 2009).

Dalam merumuskan *epidemiological transition*, Omran membagi sejarah manusia menjadi tiga era, yaitu 1) era wabah dan kelaparan, 2) era surutnya pandemi dan 3) eradegeneratif dan penyakit buatan manusia (man-made disease) (Kahn, 2006:8).

Masing-masing dari era tersebut memiliki pola mortalitas dan harapan hidup yang

berbeda-beda. Era wabah dan kelaparan didominasi oleh tingginya tingkat mortalitas pada usia anak-anak dan balita, era surutnya pandemi ditandai dengan mulai naiknya tingkat harapan hidup dan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, sedangkan era degenartif dan penyakit buatan manusia ditandai dengan semakin tingginya angkaharapan hidup hingga di usia tertua (*older ages*) (Kahn, 2006:8).

Dari pemaparan tersebut, konsep epidemiological transition digunakan untuk menganalisis dua komponen utama, yaitu 1) perubahan dalam jejak pertumbuhan

populasi, komposisinya, terkhusus distribusi usia dari lebih muda ke lebih tua, 2) perubahan dalam pola mortalitas, termasuk bertambahnya angka harapan hidup dan menata kembali tingkatan relatif penyebab-penyebab kematian (McKeown, 2009).

Konsep epidemiological transition ini merupakan terobosan yang besar dalam kajiandemografik, tetapi para ilmuwan demografi berpikir bahwa konsep epidemiological transition tidak cukup. Oleh karena itu, Lerner pada tahun 1973 mengeluarkan konsep baru yang lebih luas, yaitu *Health Transition* (Frenk, *et al*, 1991:22).

Health transition merupakan konsep yang lebih luas dari *epidemiological transition*. Jika *epidemiological transition* hanya menganalisis penyebab-penyebab kematian, maka Health transition memasukkan elemen konsepsi sosial dan perubahan perilaku kaitannya dengan penentu-penentu kesehatan (Frenk, *et al*, 1991:22; Kahn, 2006:10). Dengan begitu, analisis terhadap perubahan pola kelahiran, kematian, penyakit dan disabilitas juga perlu dikaji dari faktor-faktor sosial (*social disruption*) serta perilaku kesehatan penduduk.

B. Industrialisasi

Untuk membicarakan masalah ekonomi sektor industri dan perdagangan dengan kompleksitas persoalannya dari perspektif Islam, pertama-tama penulis mesti melangkah ke persoalan yang lebih mendasar, yaitu paradigma perekonomian dalam Islam yang setidaknya mengakomodir

tiga domein utama, yakni; [1] domein tata kehidupan [2] domein pemenuhan kebutuhan, dan [3] domein ridla Allah.¹ Dengan payung paradigma ini, penulis akan memasuki *turath* Islam, baik dalam bentuk prinsip dasar maupun operasional, baik yang terdapat dalam teks-teks *naş* maupun pengalaman historis masyarakat Islam.

Secara ontologis, industri pada hakikatnya adalah produksi. Agar proses itu berjalan sesuai tujuan shari'ah, maka perlu landasan filosofis yang diharapkan mampu menjadi parameter keabsahan sebuah transaksi perdagangan. Dalam Islam, landasan filosofis tersebut disebut dengan masalah. Secara definitif, masalah adalah ungkapan untuk menunjukkan adanya suatu manfaat atau hilangnya sebuah maḍarat.²

Untuk melihat konstruk industri rokok di Kudus, penulis menggunakan teorinya Ibnu Khaldun yang mensinyalir adanya hubungan antara tradisi masyarakat, solidaritas kelompok, intervensi pemerintah dan peningkatan industri. Ibn Khaldūn memakai istilah *al-shanā'i* bentuk plural dari *shāni'ah* yang secara etimologis berarti "*craft*" atau pekerja kerajinan tangan. Dalam bahasa ekonomi industri, istilah tersebut mungkin dapat dimaknai sebagai sektor manufaktur.

Selain istilah ini, Ibn Khaldūn juga memakai istilah lain yang sudah lazim dipakai pada saat itu, yakni "*al-'ulūm*" atau ilmu. Penggunaan dua

¹ Paradigma ini pada dasarnya melengkapi pemikiran Monzer Kahf, Choudhuri, Mannan dan Marshall. Murassa Sarkaniputra, "adl dan ihsan dalam ekonomi Islam" dalam *Jurnal al-Iqtisadiyyah*, vol. 1, Januari 2004.

² Abu Hamid Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustaşfa*, vol I (Beirut: Dar al-Fikr, it), 284

istilah ini secara serentak menandakan bahwa Ibn Khaldūn sadar mengenai dua aspek dalam ilmu, yakni aspek teoritik dan terapan. Ilmu murni mungkin paralel dengan istilah "*al-'ulūm*", sementara ilmu terapan adalah sepadan dengan istilah "*al-shanā'i*"³

Perbincangan dua hal tersebut diletakkan Ibn Khaldūn dalam konteks '*umrān*' yang dalam istilah modern diterjemahkan sebagai "peradaban". Namun penulis lebih cenderung dengan pemaknaan Ulil Abshar yang mengartikannya dengan "urbanisme" atau gejala meng-kota agar lebih sesuai dengan pembahasan teori siklus populasi. Menurutnya, produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Demikian pula, semakin besar populasi semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya.

Namun populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Semakin besar volume produksi, maka semakin besar *demand* terhadap tenaga kerja, dan populasi-pun semakin tinggi. Ini artinya ada siklus antara produksi dan populasi. Produksi menarik populasi, dan populasi memompa volume produksi.

Jadi, menurut mekanisme ini, ada proses kumulatif perkembangan dan ada pula proses kumulatif keterbelakangan. Kota-kota kaya menarik lebih banyak produsen sehingga menjadikannya semakin kaya, dan kota-kota miskin akan melemahkan semangat produsennya dan menjadi lebih miskin karena mereka akhirnya bermigrasi. Akibatnya, produksi manufaktur semakin

³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, (Kairo: Dār al-'Ulūm, tt), 401

berkembang, sementara produksi agrikultur semakin berkurang. Peningkatan taraf hidup pekerja kota juga menyebabkan naiknya harga barang-barang manufaktur, sehingga pendapatan pada sektor industri akan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor agrikultur.

Dalam analisisnya Ibn Khaldūn mengatakan bahwa masyarakat yang belum mencapai suatu kematangan dalam urbanisme di mana kota-kotanya belum berkembang (*tatamaddan al-madīnah*) cenderung untuk memusatkan diri pada usaha untuk mencukupi kebutuhan subsisten, yaitu mengusahakan bahan pangan pokok (*al-aqwāt*). Setelah tahap ini terlampaui, dan kota-kota mereka kian maju, serta sejumlah bidang pekerjaan (*al-a'māl*) mulai muncul, maka pelan-pelan mereka akan mulai memanfaatkan surplus kekayaan yang ada (*al-zā'id*) untuk hal-hal yang bersifat kemewahan hidup, "luxuries" (*al-kamālāt min al-ma'āsh*).⁴

Dengan demikian, dalam bahasa ekonomi, Ibnu Khaldun mensinyalir telah terjadi peningkatan sector industri karena didorong oleh faktor produksi (*faktor driven*). Pemikiran inilah yang akhirnya dikembangkan oleh Rostow, Lewis, Smith, Solow Swan dan mereka yang berparadigma *Production Centered Development*. Teori di atas akan penulis jadikan sebagai alat bantu untuk membaca fenomena pasang surut industri rokok Kudus.

⁴ Dalam perkembangan modern, pikiran Ibnu Khaldūn ini diadopsi dalam konsep Ekonomi Islam tentang *needs*, sebagai diungkapkan Fahim Khan, yang mencakup seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang memiliki *maṣlahah*. *Maṣlahah* dalam konteks ini adalah sebagaimana yang diteorikan Al-Shatibi, yakni kepemilikan atau kekuasaan atas suatu barang atau jasa yang mengatur *the basic elements* dan tujuan-tujuan kehidupan manusia di dunia ini, yang meliputi: *life (al-nafs)*, *property (al-māl)*, *faith (al-dīn)*, *intellect (al-'aql)* dan *posterity (al-nasl)*.

Untuk membaca perkembangan industri mereka di era global, penulis akan membacanya dengan *teori investment driven* dan *innovation driven*. Pilihan teoritik ini didasari oleh kenyataan bahwa Kudus dalam ukuran tertentu mengalami ketergantungan dengan modal guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Berkaitan dengan hubungan industri dengan politik, penulis akan tetap menggunakan ide dasar Ibnu Khaldūn yang telah dikembangkan oleh al-Jābirī dalam *al-'Aql al-Siyāsī al-'Arabī*. Berangkat dari tiga kunci yang dikemukakan Ibn Khaldūn itu, Al-Jabiri menggubah nama tiga variabel politik yang lebih fungsional dan akrab di telinga dan tradisi masyarakat Islam: *al-'aqīdah*, *al-qabīlah* dan *al-ghanīmah*.⁵ Menurut hipotesis penulis, variabel-variabel diatas masih signifikan untuk menjelaskan relasi industri dengan politik. Secara politis, kue industri (laba, ghanimah) tidak bisa dilepaskan dari faktor ideologi dan kelompok (etnis, klan, dll).

D. Fluktuasi ekonomi

Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus menerus bertumbuh, tanpa satu tahun atau bahkan satu triwulan pun mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut disertai stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas neraca perdagangan dan neraca pembayaran pun mengalami surplus yang baik.

Perekonomian seperti ini dipercaya akan mampu memberikan kemakmuran dan

⁵ 'Abid al-Jābirī, *al-'Aql al-Siyāsī al-'Arabī* (Beirut: Dār al-Thaqāf al-'Arabī, 1991).

keadilan bagi rakyatnya dari generasi ke generasi. Sayangnya, perekonomian tersebut diatas hanya ada di dunia khayal. Dalam dunia nyata, perekonomian umumnya mengalami gelombang pasang surut. Gelombang naik turun tersebut relatif teratur dan terjadi berulang-ulang dengan rentang waktu yang bervariasi. Ada yang berdurasi pendek, panjang dan sangat panjang. Dalam ilmu ekonomi, gerak naik turun tersebut dikenal dengan siklus ekonomi (*business cycle*)

Kegiatan dalam perekonomian berfluktuasi dari tahun ke tahun. Selain itu juga dalam perekonomian mempunyai siklus ekonomi. Di era modernisasi ini produksi barang dan jasa meningkat oleh karena itu berpengaruh juga semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya jumlah modal dan berbagai kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi ini membuat semua orang dapat hidup dengan standar yang lebih tinggi. Pada saat itu perusahaan gagal menjual seluruh barang dan jasa yang harus mereka tawarkan, sehingga produksi harus dikurangi. Dampaknya, para pekerja dirumahkan, angka pengangguran meningkat, dan pabrik-pabrik terpaksa berhenti beroperasi.

Siklus ekonomi adalah periode yang terulang secara teratur dalam pengembangan sebuah pasar perekonomian. Keseluruhan trend dari pertumbuhan ekonomi disertai dengan adanya fluktuasi secara periodik dalam aktivitas perekonomian, yaitu: kemunduran dan perluasan yang terjadi secara silih berganti pada produksi, investasi, peningkatan dan penurunan pada level

pendapatan, ketenagakerjaan, harga-harga, suku bunga dan rate pada sekuritas. Siklus aktivitas ekonomi meliputi 4 fase berikut :

1. Ekspansi

Setelah mencapai titik terendah pada sebuah siklus ada sebuah fase pemulihan, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan lapangan kerja dan produksi. Banyak ekonom yang mempercayai bahwa tahapan ini memiliki tingkat inflasi yang rendah hingga perekonomian mulai beroperasi pada kapasitas penuh atau, dengan kata lain hingga perekonomian mencapai tahapan peak.

2. Peak

Sebuah peak, atau puncak dari siklus bisnis, adalah titik tertinggi pada suatu pemulihan perekonomian. Pada titik ini, pengangguran mencapai titik terendah atau bahkan tidak ada sama sekali dan perekonomian berjalan dengan muatan maksimal (atau hampir), dimana seluruh modal dan sumber daya tenaga kerja pada negara tersebut terlibat dalam produksi. Biasanya, meski tidak selalu, selama terjadinya tahapan peak, tekanan inflasi meningkat.

3. Resesi

Resesi adalah suatu periode pengurangan output dan aktivitas bisnis. Sebagai akibat dari pasar yang mengalami penurunan, yang biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran. Kebanyakan ekonom mempercayai bahwa kemerosotan perekonomian atau resesi

hanyalah sebuah penurunan dalam aktivitas bisnis, yang berlangsung setidaknya selama enam bulan.

4. *Bottom*

Bottom pada siklus perekonomian adalah titik terendah pada produksi dan ketenagakerjaan. Dipercaya bahwa sampainya level/tahapan *bottom* memprediksikan bahwa akhir dari resesi pada tahapan pada siklus ini tidaklah lama. Namun sejarah mengetahui dan memprotes aturan ini. Depresi terbesar pada tahun 1930 bertahan hingga hampir 10 tahun lamanya.

Aktivitas siklus perekonomian bervariasi dan berbeda-beda durasinya, yaitu durasi pada fase individual, ketinggian maksimal dan kedalaman maksimal. Saat ini, meredakan fluktuasi siklus dan aktivitas bisnis menjadi perhatian, sehingga jarak antara krisis satu dengan yang berikutnya menjadi lebih lama, tingkat kedalaman dan kekuatan destruktifnya pun menjadi lebih berkurang. Kebanyakan, suatu krisis digantikan oleh resesi dalam bentuk yang lebih ringan.

Meskipun ada anggapan bahwa perubahan dalam kegiatan bisnis secara langsung

maupun tidak langsung berkaitan dengan siklus ekonomi, namun juga ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi ekonomi. Yang paling penting diantara faktor-faktor tersebut adalah fluktuasi musiman, dan trend jangka panjang.

Pengaruh dari variasi-variasi musiman dapat diamati pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Pada perdagangan ritel terjadi peningkatan yang dramatis. Pada industri lain, seperti agrikultur, konstruksi dan industri mobil, juga ada variasi-variasi musiman.

Siklus ekonomi sering di asosiasikan dengan perubahan-perubahan pada volume output. Banyak ekonomis yang mempercayai bahwa output tersebut biasanya diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP) dan indikator yang paling dapat diandalkan pada perekonomian. Penting untuk diingat bahwa siklus ekonomi pada fase *recovery*, bukanlah peningkatan pada GDP, namun merupakan langkah dari peningkatan ini. Nilai negatif pada tingkat pertumbuhan selama suatu periode waktu tertentu, biasanya selama 6 bulan atau lebih, dapat dianggap sebagai sebuah tanda penurunan pada suatu perekonomian. Sebaliknya, tingginya tingkat pertumbuhan secara konsisten dari bulan ke bulan, menunjukkan bahwa perekonomian tersebut saat ini sedang *booming*.

Aktivitas siklus ekonomi berkaitan siklus perekonomian kecil dalam 10 tahun, yang berkembang sebagai latar belakang dari perkembangan sebuah siklus perekonomian besar hingga 50-60 tahun. Siklus perekonomian yang besar diperkenalkan oleh ekonomis Rusia, Kondratyev. Siklus perekonomian ini meliputi fluktuasi kenaikan dan penurunan pada kondisi ekonomi, dimana masing-masing bertahan hingga 30 tahun lebih. Siklus perekonomian besar berdasar pada perubahan revolusioner pada teknologi, desain dan produksi barang-barang kebutuhan. Transisi menuju masyarakat pasca-industri di

negara-negara berkembang bertepatan dengan gelombang kelima terpanjang pada siklus Kondratyev. Permulaan fase naik dikaitkan dengan restrukturisasi perekonomian berdasarkan pada teknologi-teknologi *high-profile* dan *science-intensive*.

Di era 1980-an, dimana gelombang globalisasi menerjang seantero dunia,⁶ intensitas dan cakupannya menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan. Tidak hanya bidang ekonomi, bisnis, budaya, politik, ideologi, melainkan juga telah menjamah ke tataran *systems, processes, actors, dan events*,⁷ sehingga disana melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan.⁸

Dengan agenda globalisasi ekonomi, maka tata dunia baru akan bertumpu pada kekuasaan modal dan pemilik modal. Dalam hal ini ada tiga agenda utama yaitu: (1) tataran tindakan, tata kekuasaan global yang bertumpu pada praktek bisnis raksasa lintas negara; (2) pelaku utamanya adalah

⁶ Sebenarnya globalisasi sendiri bukanlah suatu fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Sebelum kemunculan *nation-state* perdagangan dan migrasi lintas benua telah sejak lama berlangsung. Jauh sebelumnya perdagangan regional telah membuat interaksi antar-suku bangsa terjadi secara alamiah. Sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad ke-20 ini, globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan. Dua dekade sebelum Perang Dunia I, arus uang internasional telah mengikatkan Eropa lebih erat dengan Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pasar modal mengalami *booming* di kedua sisi Atlantik, sementara itu bank dan investor-investor swasta sibuk mendiversifikasikan investasinya dari Argentina hingga Singapura. Jeffrey E. Garten, "Why the Global Economy is Here to Stay," dalam *Business Week*, March 23, 1998: 9; Collin Rose dan Malcolm J. Nicholl, *Accelerated Learning for the 21 st Century* (New York: Delacorte Press, 1997), 1.

⁷ Jan Pronk, "Globalization: A Developmental Approach", dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), *Global Futures, Shaping Globalization* (London: Zed Books, 2001), 43.

⁸ Sekalipun demikian tidak berarti bahwa prosesnya berlangsung dengan mulus. Kecenderungan globalisasi ternyata disertai dengan fragmentasi. Gambarannya akan lebih kentara dengan mengkontraskan elemen-elemen dari setiap kecenderungan. Di satu sisi, globalisasi mengandung elemen-elemen: *integration, interdependence, multilateralism, openness, dan interpenetration*. Di sisi lain, elemen-elemen dari fragmentasi ialah: *disintegration, autarchy, unilateralism, closure, dan isolation*. Sementara itu, globalisasi mengarah pada *globalism, spatial compression, universalism, homogeneity, dan convergency*; sebaliknya fragmentasi mengarah pada *nationalism* atau *regionalism, spatial distension, separatism, heterogeneity, dan divergency*. Walter Leimgruber, *Between Global and Local*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2004), 18-19.

perusahaan-perusahaan trans-nasional (*Multinational Corporation, MNCs*) ; dan (3) proses kultural ideologis yang dibawanya adalah konsumerisme.⁹ Praktek perdagangan bisnis tran-nasional didorong dan didukung oleh regulasi dan kesepakatan internasional yang kerap disebut sebagai ‘aturan baru’ dalam kerangka pasar bebas. Kesepakatan tersebut seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), WTO (*World Trade Organisation*), GATS (*General Agreement on Trade in Services*), TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Right*), TRIMs (*Trade Related Invesment Measures*), AoA (*Agreement on Agriculture*) dan sebagainya.

Ada dua pilar utama yang menopang sistem ini. yaitu pasar uang (sistem perbankan) dan pasar modal. Kedua pilar (sektor finansial) inilah yang memungkinkan terjadinya proses akumulasi modal yang sangat pesat. Sedemikian pesatnya sehingga kian tak berkaitan langsung (decoupling) dengan perkembangan sektor real. Peningkatan kesejahteraan yang bersumber dari aktivitas di kedua pasar ini kian artifisial dan oleh karena itu mengakibatkan kerentanan di dalam perekonomian khususnya dan kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini disebabkan oleh pola eksploitasi yang telah

⁹ Di era ini, problem pemerataan muncul dalam konteks yang lebih besar. Negara dunia ketiga masih berkuat dengan problem kemiskinan, sementara negara-negara industri sudah mengalami kemakmuran. Negara-negara Dunia Ketiga itu dibuat bergantung atas nama globalisasi. Diantara hal yang mendorong ketergantungan ini ialah transformasi kelas menengah di negara-negara Dunia Ketiga menjadi kompromistis dan berpaling ke Barat dalam hal kepemimpinan politik, disamping adanya faktor-faktor eksternal seperti hubungan perdagangan yang amat menyulitkan kebanyakan negara Dunia Ketiga. Praktik perdagangan dan keuangan internasional sering meletakkan negara-negara sedang berkembang pada posisi yang bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar penguasaan negara-negara itu.

melampaui batas-batas negara sebagai konsekuensi dari gelombang globalisasi.¹⁰

Dalam konteks globalisasi ekonomi inilah term keunggulan komparatif menjadi signifikan. Tema keunggulan komparatif, yang sejak awal digagas oleh tradisi klasik, berkembang seiring dengan terjadinya perdagangan internasional, melalui tokoh-tokohnya seperti John Stuart Mill dan David Ricardo. Dalam konsep "tradisional", teori keunggulan komparatif didefinisikan sebagai bentuk keunggulan nilai produk suatu negara yang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproduksi barang. Sehingga, cara pandang ini lebih menekankan unsur "produktivitas" sebagai faktor pentingnya (selanjutnya konsep ini dikenal dengan sebutan "Model Ricardian". Apabila dalam suatu negara produktivitas tenaga kerjanya tinggi, dan dengan begitu biaya produksinya murah, maka negara tersebut bisa dikatakan memiliki keunggulan komparatif.

Tetapi dalam perkembangannya, pengertian itu relatif ketinggalan jaman akibat tidak bisa mengakomodasi dinamika perubahan yang terjadi. Kondisi aktual memperlihatkan, bahwa letak keunggulan relatif (komparatif) bukan hanya dikonstruksikan oleh produktivitas tenaga kerja, melainkan juga faktor-faktor lain, seperti: tingkat upah, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur ekonomi dan nilai tukar mata uang (*kurs*). Jadi bisa saja, misalnya, produktivitas tenaga kerja suatu negara tinggi tetapi karena

¹⁰ Kajian lebih lanjut dapat ditelusuri dalam: Paul Baran, *Political Economy of Growth* (New York: Monthly Review-Press, 1957); Andre Gunder Frank, *The Development of Under development* (New York: Monthly Review Press, 1971).

upah tenaga kerjanya juga relatif sangat besar, maka menjadi berbiaya mahal sehingga menjadi tidak unggul (*comparative disadvantage*). Singkatnya, suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika dalam kegiatan-kegiatan ekonominya banyak menggunakan faktor-faktor produksi yang relatif lebih tersedia atau murah terdapat di negara tersebut dari pada negara-negara yang merupakan mitra perdagangannya.

Konsep tersebut pada akhirnya banyak menimbulkan kritik karena dianggap tidak lagi relevan serta terlampau sempit ruang lingkungannya, sehingga kurang memadai untuk mencakup determinan-determinan pokok yang menentukan keberhasilan ekonomi. Oleh karenanya, konsep keunggulan komparatif harus diganti dengan keunggulan kompetitif yang memperhitungkan semua faktor pokok yang mempengaruhi daya saing suatu perusahaan atau suatu industri, sehingga lebih berguna bagi perumusan kebijakan ekonomi. Faktor daya saing itu antara lain adalah persaingan sehat antar industri, adanya diferensiasi produk, dan kemampuan teknologi. Faktor teknologi inilah yang kerap merancukan dan menjadi salah satu titik perdebatan antara strategi keunggulan komparatif dan kompetitif.

Pertama, faktor teknologi oleh sebagian analis dianggap merupakan variabel penting yang membentuk keunggulan kompetitif suatu negara. Menurut pandangan ini, pada era sekarang ini biarpun suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam bentuk apapun (SDA, kurs mata uang, produktivitas, upah), tetapi jika tidak memiliki kemampuan teknologi, maka keunggulan tersebut akan hilang. Jadi di sini keunggulan kompetitif

diletakkan secara diametral berhadapan dengan keunggulan komparatif. *Kedua*, dalam pandangan makro, bukankah setelah suatu negara mempunyai kemampuan teknologi dengan sendirinya ia merupakan keunggulan komparatif (bukan kompetitif). Dalam perspektif ini, keberadaan teknologi dianggap sama dengan faktor-faktor lain seperti upah, kurs mata uang, sumberdaya alam, dan produktivitas tenaga kerja yang dapat menjadi keunggulan (*advantage*) atau pun kelemahan (*disadvantage*) suatu negara. Dalam pengertian ini pula, keberadaan teknologi tetap merupakan suatu faktor yang bisa dikomparasikan dengan pihak lain atau antar negara.

Sementara itu, pandangan mazhab strukturalis berpikiran lain dalam beberapa aspek. *Pertama*, perbedaan cara pandang terhadap sumber-sumber keunggulan komparatif. Selama ini paradigma neoklasik melihat bahwa letak keunggulan komparatif suatu negara banyak diakibatkan oleh kekayaan sumberdaya alam, persediaan modal fisik, dan jumlah penduduk. Sementara paradigma strukturalis melihat dari kacamata lain, bahwa keunggulan komparatif suatu negara itu banyak bersumber dari hasil pembelajaran, infra-struktur teknologi yang berlainan, dan pasar lokal (domestik) yang progresif.¹¹

Dari sini terlihat, bahwa aliran neoklasik melihat faktor keunggulan itu dari "*apa yang ada*" (positif), sementara paham strukturalis melihatnya dari "*apa yang seharusnya ada*" (normatif).

¹¹ Moshie Justman, Morris Teubal, *A Structuralist Perspective on the Role of Technology in Economic Growth and Development*, World Development, Vol. 19, No. 9, 1991, 1175.

Kedua, perbedaan dalam cara pelestarian atas sumber-sumber keunggulan. Sebagai akibat dari perbedaan terhadap sumber-sumber keunggulan komparatif, maka berimplikasi kepada penanganan pelestariannya. Di sini paradigma neoklasik cenderung berupaya untuk menjaga dan memperbaharui sumberdaya alam yang dimiliki, mengakumulasi modal secara berkesinambungan, mengelola pertumbuhan penduduk dan migrasi, dan melakukan penyesuaian upah. Sebaliknya, paradigma strukturalis lebih *concern* untuk menata dan memperkuat pembangunan industri pemulanya (*infant industry*) melalui investasi infrastruktur teknologi dan pelatihan. Di samping itu juga menyiapkan paket kebijakan makro ekonomi yang kondusif bagi pembangunan industri tersebut.

Ketiga, perbedaan dalam menciptakan dasar pondasi) kebijakan. Dalam hal ini paradigma neoklasik memilih memakai piranti-piranti tingkat tabungan dan instrumen makro lainnya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Sementara paradigma strukturalis memberikan penekanan kepada kebijakan yang bisa mengarahkan kepada penciptaan infrastruktur yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Di sini dapat dijelaskan, bahwa kebijakan strukturalis hendak menciptakan keunggulan komparatif dengan cara menciptakan kebijakan yang secara langsung mendukung pilihan tersebut.

Secara umum, perbedaan pandangan pandangan Neoklasik dan Strukturalis tentang Keunggulan Komparatif tampak dalam table berikut ini:

JENIS	NEO KLASIK	STRUKTURALIS
Sumber-sumber keunggulan komparatif	Sumber daya alam, persediaan modal, jumlah penduduk	Hasil pembelajaran pengalaman yang berbeda, infrastruktur teknologi yang berlainan, pasar lokal yang progresif
Cara pelestarian	SDA yang diperbami, akumulasi modal fisik, penumbuhan penduduk alamiah dan migrasi kenaikan upah	Pengembangan kemampuan pembangunan dan industri pemula melalui investasi dalam infrastruktur teknologi yang spesifik dan pelatihan penerapan kebijakan yang tepat
Dasar kebijakan turunan	Tingkat tabungan sebagai sasaran instrumen makro ekonomi	Penekanan pemilihan strategi yang bertumpu kepada pembangunan infrastruktur spesifik

Perbedaan sudut pandang antara neoklasik dan strukturalis dalam memahami keunggulan komparatif berdampak cukup fundamental dalam pemilihan kebijakan industrialisasi, khususnya menyangkut sektor-sektor yang hendak dikembangkan. Kesimpulan sementara yang bisa diajukan, paradigma neoklasik cenderung memaknai keunggulan komparatif sebagai sesuatu yang sebenarnya telah ada dalam negara dan itulah yang harus dikembangkan, sehingga secara tidak langsung melanggengkan proses "pembagian kerja internasional" (*the division of international labor*). Sementara di sisi lain, paradigma strukturalis memahami keunggulan komparatif sebagai sesuatu yang harus diciptakan untuk mendukung potensi riil yang telah ada sehingga setiap negara bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lain.¹²

¹² Pembahasan tentang pembangunan model strukturalis, lihat tulisan Ruccio, David F. Lawrence H. Simon, *Methodological Aspects of a Marxian Approach to Development: An Analysis of the Modes of Production School*, World Development, Vol. 14, No. 2, 1986.

Dalam dataran praksis, pemahaman terhadap pandangan keunggulan komparatif tersebut, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, biasanya juga mempengaruhi pilihan pengambilan kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang. Secara ekstrem, pilihan kebijakan tersebut bisa dipilah dalam dua kategori, yakni: kebijakan industrialisasi yang bertumpu kepada orientasi ekspor/promosi ekspor (*outward oriented/export promotion*) dan kebijakan yang menekankan orientasi ke dalam/substitusi impor (*inward oriented/import substitution*). Kedua pilihan ini nyata-nyata diterapkan secara luas oleh seluruh negara, khususnya negara berkembang, dengan derajat yang berlainan antara satu dengan lainnya. Khusus untuk negara berkembang, pola yang biasa digunakan adalah terlebih dulu memakai orientasi substitusi impor dan baru kemudian merembet ke orientasi promosi ekspor setelah perekonomian dianggap cukup kuat.

Pilihan kebijakan-kebijakan tersebut setidaknya bisa ditelusuri dalam rentang waktu pasca Perang Dunia Kedua, ketika semua negara mulai mengaktifkan perekonomiannya sehingga berdampak kepada membaiknya perdagangan dunia. Nilai dan volume perdagangan dunia meningkat cukup pesat serta menjadi faktor penting yang membuat pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara mengalami peningkatan. Hanya saja, akselerasi perdagangan dunia itu menggambarkan keadaan yang tidak sejajar antara negara maju dengan negara berkembang yang ditandai dengan posisi neraca pembayaran negara berkembang yang selalu defisit terhadap negara maju. Kecenderungan ini tentunya menimbulkan persoalan besar bagi negara

berkembang, karena dengan adanya defisit tersebut maka cadangan devisa yang digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi domestik menjadi tidak tersedia.

Paling tidak terdapat dua alasan yang bisa menjelaskan terjadinya kondisi tersebut, yakni: (i) ekspor negara berkembang kebanyakan berbentuk produk primer dengan ciri elastisitas permintaan rendah dan sering mengalami gejolak harga; sebaliknya sebagian besar impor negara berkembang justru berupa produk manufaktur dengan ciri elastisitas permintaan tinggi dan harga yang selalu stabil; dan (ii) negara maju —akibat tingkat teknologi dan sumberdaya manusia (SDM) yang lebih baik— bisa menghasilkan produksi yang lebih efisien dan kompetitif, sehingga relatif lebih mampu menembus pasar negara berkembang. Kedua hal inilah yang terus-menerus menggerogoti neraca pembayaran *negara berkembang dalam kaitannya dengan perdagangan luar negeri*, sehingga menimbulkan kemerosotan surplus ekonomi secara permanen.

Alasan itulah yang kemudian mendasari negara-negara berkembang untuk membatasi impor produk manufaktur dari negara maju dengan jalan menciptakan industri manufaktur sendiri. Tetapi karena industri manufaktur domestik masih rapuh (*infant industry*), maka untuk mencegah persaingan dengan industri luar negeri, pemerintah negara berkembang mengambil kebijakan melindungi industri domestik dengan memberikan proteksi, seperti: subsidi, hak monopoli, lisensi, kuota dan lain-lain. Di samping itu seperangkat kebijakan proteksi lain juga diluncurkan,

seperti perlindungan tarif untuk industri dalam negeri, pengaturan kurs mata uang untuk memperoleh hasil yang sama, dan serangkaian kebijakan untuk memperluas pasar dalam negeri. Kebijakan ini sering dipahami sebagai strategi substitusi impor (SI), dan dalam kurun waktu tertentu cukup berhasil dilaksanakan.¹³

Tetapi strategi SI ternyata tidak bisa bertahan lama, karena kemudian perekonomian negara berkembang mengalami siklus kelesuan lagi. Hal ini disebabkan, *pertama*, kebijakan SI tidak bisa membuat perekonomian (perusahaan) bekerja dalam skala efisiensi yang memadai (*economic of scale*) karena relatif terbatasnya pasar yang dirambah serta tiadanya kompetisi secara *fair* antar industri di dalam negeri. Dengan begitu, karena perusahaan bekerja secara tidak efisien, maka produk luar negeri relatif mudah menembus pasar domestik, yang berujung dengan kembali memburuknya neraca pembayaran. Ini tentunya fakta yang paradoksal, di mana strategi SI pada awalnya dianggap sebagai instrumen yang akan memperkuat ekonomi domestik dan neraca pembayaran, tetapi dalam perjalanannya justru semakin memperlemah efisiensi ekonomi domestik.

Kedua, pandangan rezim proteksionis bahwa "perusahaan akan belajar dari apa yang telah dikerjakannya" ternyata tidak menemui pembuktiannya. Keyakinan bahwa perusahaan-perusahaan yang pada awalnya mendapatkan perlindungan istimewa tersebut pada akhirnya akan

¹³ Ian Roxborough, *Teori-Teori Keterbelakangan*, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 33.

bisa bekerja secara efisien dan kompetitif ternyata tidak berjalan. Perusahaan yang mendapatkan proteksi itu ternyata tidak pernah menjadi besar, bahkan justru memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mengandalkan hak monopoli yang dimiliki. Juga, strategi SI menimbulkan dampak sampingan berupa konsentrasi pasar yang tidak sehat.

Di samping efek negatif di atas, dalam pandangan lain strategi SI juga dianggap sebagai faktor penting yang bertanggung jawab atas kegagalan suatu negara untuk mendorong ekspor. *Pertama*, adanya sejumlah efek langsung yang menghambat ekspor, seperti penjatahan devisa untuk mengimpor bahan baku dan bahan setengah jadi, peraturan "*local content*" yang meningkatkan biaya operasi, serta tarif-tarif perdagangan. *Kedua*, adalah persaingan antara industri substitusi impor dengan eksportir untuk mendapatkan modal dan tenaga kerja terlatih yang langka. *Ketiga*, adalah efek makro ekonomi; tingkat inflasi di negara berkembang biasanya lebih tinggi dari pada di negara industri, dan karena itu mata uangnya secara periodik harus didevaluasi untuk dapat bersaing di pasar internasional.¹⁴

Setelah menyadari tujuan yang hendak dicapai lewat strategi SI tidak berhasil, negara-negara berkembang mulai mereformulasi kebijakannya dengan lebih mengedepankan kepada kepentingan ekspor (promosi ekspor). Kebijakan ini pada dasarnya lebih memberikan penekanan kepada

¹⁴ "Hadi Soesatro, Teknologi dan Keunggulan Komparatif, Analisis CSIS, Tahun XXI, No. 3 Mei-Juni 1992, hal. 278.

pemberian insentif ekonomi yang bisa memacu ekspor relatif terhadap kecenderungan kebijakan yang memberikan insentif terhadap impor. Dalam bahasa ekonomi, kebijakan ini diformulasikan dengan rumus "nilai tukar efektif atas ekspor" (*effective exchange rate on exports*, disingkat EERx) dibuat lebih besar daripada "nilai tukar efektif atas impor" (*effective exchange rate on imports*, disingkat EERm). Strategi ini, dengan begitu, menjadi alternatif baru untuk menggeliatkan per-ekonomian domestik setelah strategi SI terbukti gagal menunaikan tugasnya.

Setidaknya terdapat beberapa alasan pokok mengapa negara-negara berkembang perlu menerapkan kebijaksanaan promosi ekspor: Antara lain; untuk memperkuat penerimaan devisa atau untuk meredam gejolak perekonomian internasional; Memacu akselerasi pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri untuk tujuan ekspor dengan pencarian peluang pasar yang luas di berbagai Negara; Memperkuat dan memperluas kedudukan ekspor komoditas tradisional yang telah dikembangkan sejak lama dalam bentuk yang telah terproses sebagai barang jadi; Meningkatkan penerimaan produsen (petani, pedagang, industriawan) maupun eksportir dalam kegiatan ekspor; Mempertinggi tingkat kepastian usaha bagi produsen dan eksportir melalui pencarian pasar yang tidak terbatas di luar negeri; Mempertinggi tingkat penyerapan tenaga kerja lewat berbagai kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk ekspor, baik untuk ekspor komoditas tradisional maupun komoditas industri manufaktur; Pengembangan industri untuk tujuan ekspor

secara tidak langsung merupakan proses untuk mensubstitusi barang-barang manufaktur.

Negara-negara yang menganut orientasi keluar (*outward oriented*) tersebut menjalankan kebijakan secara selektif dalam memilih sektor-sektor ekonomi yang akan diberikan insentif sehingga bisa menembus pasar internasional. Pada titik inilah kejelian untuk mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang layak untuk "diunggulkan" menempati posisi yang sangat penting dalam penyusunan prioritas insentif. Dan dari sini pula pemahaman terhadap komponen keunggulan komparatif yang dimiliki dari masing-masing negara akan menuntun pengambil kebijakan (*decision maker*) dalam menyusun kebijakan yang tepat, di mana nantinya akan terlihat bahwa perbedaan cara pandang terhadap konsep keunggulan komparatif akan menuntun pada pengambilan kebijakan yang berlainan pula.

Menjadi suara kajian yang menarik, ketika secara empirik negara-negara berkembang yang relatif memiliki SDA dan jumlah penduduk yang besar ternyata justru tertinggal dalam mengakselerasi kinerja ekonominya. Sebaliknya, negara-negara berkembang yang kurang memiliki potensi SDA dan jumlah penduduk justru dapat mendorong *performance* industrialisasinya dengan hasil yang mengagumkan.¹⁵ Seperti diketahui bersama; Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura yang tidak memiliki keunggulan SDA dan jumlah penduduk, sekarang ini malah memiliki

¹⁵ Santo Dodaro, Comparative Advantage, Trade and Growth: Export-Led Growth Revisited, World Development, Vol. 19, No. 9, 1991, hal 1154.

pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan dikenal sebagai empat macan Asia (bersama dengan Taiwan).¹⁶ Padahal selama ini terdapat kepercayaan, bahwa salah satu *endowment* terpenting yang bisa membawa perekonomian suatu negara maju secara pesat adalah ketersediaan sumberdaya alam yang mencukupi.

Ada dua argumentasi yang bisa menjelaskan fenomena tersebut, yang sebenarnya keluar dari pakem neoklasik. *Pertama*, negara-negara berkembang yang saat ini mengalami tahap industrialisasi cukup maju pada awalnya sudah memberikan landasan kebijakan yang mengorientasikan ekonominya untuk "melihat keluar". Negara-negara seperti Korea Selatan dan Hongkong, walaupun dalam beberapa hal juga melakukan kebijakan proteksi terhadap industri domestik, memberikan insentif yang sangat besar bagi industri-industri yang memiliki kapasitas ekspor. Atau dalam pengertian yang lain, industri-industri domestik yang memperoleh proteksi benar-benar atas pertimbangan yang matang dan terseleksi, sehingga secara keseluruhan EERx yang diberikan masih lebih besar daripada EERm.

Kedua, negara-negara maju tersebut ternyata lebih menonjolkan kebijakannya kepada pemberian insentif untuk membangun investasi infrastruktur spesifik

¹⁶Fakta tersebut dalam literatur ekonomi sering disebut dengan istilah "*dutch disease*" (Penyakit Belanda). Pada tahun-tahun 1970-an, Belanda merupakan negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam (minyak gas), tetapi kondisi tersebut justru berdampak negatif terhadap ekspor manufaktur sehingga tidak dapat mengakumulasi pendapatan nasional yang lebih besar. Sebaliknya dengan 4 macan Asia, akibat tiadanya sumberdaya alam di negaranya mereka malah mampu mengakselerasi ekspor manufaktur sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan. Keterangan lebih lanjut tentang fenomena "*dutch disease*", lihat Richard E. Caves, Jeffrey A. Frankel, Ronald W. Jones, *World Trade and Payments: An Introduction*, Sixth Edition, (Haper Collins College Publishers, 1993), 112-113.

yang sesuai dengan kondisi negaranya dan memperbaiki SDM melalui pelatihan-pelatihan, yang kesemuanya itu merupakan faktor keunggulan komparatif dari paradigma strukturalis (seperti yang telah dikemukakan sebelumnya). Pemerintah Taiwan misalnya, menerapkan kebijakan mempermudah arus masuk teknologi maju serta membangun kawasan industri yang khusus menggunakan teknologi tinggi. Faktor kedua ini menjadi sangat penting, mengingat infrastruktur ekonomi dan lebih-lebih sumberdaya manusia berperan vital dalam menciptakan produktivitas ekonomi secara keseluruhan, dan bukan sekadar kepemilikan sumberdaya alam.

Dari deskripsi di atas, maka sesungguhnya industrialisasi yang tepat bertumpu kepada dua hal, yakni penerapan strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor (*outward oriented*) dan pemahaman konsep keunggulan komparatif yang tepat. Dalam hal keunggulan komparatif ini, paradigma strukturalis memberikan pandangan alternatif dan sekaligus melengkapi, bahwa ternyata faktor-faktor seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan, dan kebijakan investasi bisa merupakan jenis keunggulan komparatif dari negara. Pemahaman inilah yang membuat negara-negara seperti Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan bisa melaju industrialisasinya dengan tingkat kedalaman yang hebat. Dengan begitu, melalui penggabungan dua strategi itulah suatu negara akan mencapai tahap industrialisasi yang mencukupi.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelaahan penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa buku maupun laporan hasil penelitian, ditemukan beberapa disertasi, tesis dan

buku mengenai industri. Diantaranya adalah tulisan Aidit b. Haji Ghazali, "A Study of Industrialization From the Qur'an, Sunnah and the Islamic Civilization" yang dimuat dalam *"Industrialisation From an Islamic Perspective"*¹⁷ yang berbicara tentang konsep dasar industri dalam al-Qur'an, Sunnah dan pengalaman Negara-negara muslim; Disertasi Iskandar Budiman, *The meaning and formation of contract* yang membahas tentang mekanisme kontrak dalam hubungan industrial; Buku Martin Stephen, *Industrial economic: Economic Analysis and public policy* yang membahas kebijakan public di sector ekonomi, diserasi Bambang Setiadji, *Upah Antar Buruh Industri di Indonesia*, yang secara spesifik membahas upah buruh industri¹⁸ dan Muhammad Rawwâs al-Qal'ajî, *Nazrah al-Islâm li al-'Amal wa Atharuh fî al-Tanmiyah*¹⁹ yang membahas tentang ketenagakerjaan dalam Islam.

Penelitian tentang industri di Kudus antara lain dilakukan oleh Lance Castle *Perilaku Agama, Politik dan Ekonomi Masyarakat Kudus* yang menghubungkan ketiga variable tersebut; Mark Hanuzs dalam *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes* yang meneliti tentang seluk beluk pembuatan rokok, Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok Kretek : Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara* yang berbicara tentang peranan industri rokok, Radjasa Mu'tashim dan Abdul Munir

¹⁷ Aidit b. Haji Ghazali, "A Study of Industrialization From the Qur'an, Sunnah and the Islamic Civilization" dalam *"Industrialisation From an Islamic Perspective"* (Kuala Lumpur: IKIM and EPU, 1993)

¹⁸ Setiadji, Bambang, *Upah Antar Buruh Industri di Indonesia*, (Surakarta: Muhammdiyah University Press, 2002),21

¹⁹ 'Abd al-'Azîz al-Khayyât, *Nazrah al-Islâm li al-'Amal wa Atharuh fî al-Tanmiyah* (Mesir: Dâr al-Salâm, 1989)

Mulkhan, *Bisnis Kaum Sufi; Studi Tarekat dalam Masyarakat Industri* yang menelusuri bisnis pengikut tarekat di Kudus dan thesis Masyhuri, *Konflik Sosial di Kudus; Terlibatnya S.I. Kudus Dalam Konflik Sosial Ekonomi*.

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya-karya diatas, karena akan membahas pasang surut industrialisasi yang dihubungkan dengan *local value*, *local asset* dan *local genius*-nya kabupaten yang dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Analisis ini menarik karena melibatkan sistem nilai yang telah melembaga dan hidup terus dalam suatu masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Mengingat fokus masalah dalam penelitian ini adalah fluktuasi industri rokok, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat eksploratif.

Metode penelitian yang penulis pilih adalah metode kualitatif agar mendapatkan data yang holistik (utuh) tentang pokok-pokok permasalahan yang dihadapi pengusaha rokok Kudus dalam menjalankan proyek industrialisasi.¹

Sesuai dengan watak penelitian ini, maka untuk menyelesaikannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Paradigma dan pendekatan Penelitian

Peneliti memilih paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*) dimana a] Kenyataan adalah ganda, dibentuk, dan merupakan keutuhan, b] Peneliti menggali informasi secara aktif bersama, c] Hanya waktu dan konteks yang mengikat hipotesis d] Setiap keutuhan berada dalam keadaan mempengaruhi secara bersama-sama, dan 5) Inkuirinya terikat nilai.²

Mengingat dalam kasus industri selalu berkelindan beberapa unsur dan kepentingan, baik itu yang bersifat ekonomis, psikis, sosiologis

¹Jerome Kirk dan Marc L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research* (Beverly Hills: Sage Publication, 1986), vol. I, h. 9; Lexy J. Moeliono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rusda Karya, 1993), h. 3.

²Yvonna S Lincoln dan Egon G Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publication, 1985), h. 37.

maupun politis, maka penulis memilih menggunakan pendekatan struktural fungsional. Teori ini penulis pilih karena lebih menekankan pada keteraturan (order) dan cenderung mengabaikan fenomena konflik. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari unit-unit yang saling berkaitan dan menyatu dalam sebuah keseimbangan (ekuilibrium). Perubahan-perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa kepada perubahan pada bagian yang lain.³ Sementara itu, untuk mengantisipasi munculnya persaingan dalam industri, penulis memilih untuk membacanya dengan teori strukturasi Gidden yang menfokuskan diri pada *duality of structure*.

2. *Situasi Sosial (populasi) dan Sampel*

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Kudus terletak di antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur, serta 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Kabupaten Kudus berada pada jarak ± 51 Km di sebelah Timur Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang).

Subjek penelitiannya seluruh pengusaha rokok di Kudus. Mengingat besarnya subyek, maka pengusaha yang peneliti pilih adalah pengusaha rokok yang mengalami kemajuan, stagnan dan kebangkrutan. Mengingat jumlahnya yang masih besar, maka sampel tidak bisa dihindari. Sampel ditetapkan secara *purposive sampling* dan *snow-ball*

³ Ritzer, George, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 24-25

sampling.⁴ Informan pertama diminta untuk menunjuk orang lain untuk memberikan informasi, dan kemudian informan tersebut diminta pula menunjuk orang lain dan seterusnya, sampai dicapai taraf *redudency* (ketuntasan), artinya dianggap cukup terhadap informasi yang diperlukan.

Secara *purposive*, sample penelitian ini adalah pelaku industri rokok, PPRK, GAPRI, Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Kudus, serikat pekerja sebagai representasi buruh, dan pemerintah. Sedangkan secara *snowball*, dari mereka akan muncul informan-informan lain yang ditentukan di lapangan dalam kegiatan analisis dan hipotesis kerja yang diperlukan atau setelah peneliti bisa menjaring informasi untuk menentukan sampel yang secara umum disebut *key informants* atau *key actors*.⁵

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data lapangan

Data ini berupa data laporan tahunan perusahaan, data PPRK dan Disperindag.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan meliputi data sejarah perkembangan industri rokok, hasil penelitian terdahulu dan literature lain yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta,2005), 53-55; Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Rakesarasin, 2002), cet. IV, h. 42.

⁵Sochadi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis Managemen* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, 1999). h. 162.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan:

a. Pengamatan terlibat (*participation observation*).

Pengamatan ini menuntut peneliti aktif berinteraksi dengan subyek dalam memburu data,⁶ dalam posisi sebagai pemeran serta (*complete participant*). Akan tetapi, dalam posisi tertentu, atas ijin subyek, hal-hal yang bersifat rahasia pun boleh diamati.⁷

b. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara mendalam (*depth interview*) digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pikiran serta perasaan informan, dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana informan memandang dunia ekonomi berdasarkan perspektifnya. Informasi ini diolah, ditafsirkan, dan di analisis oleh peneliti sehingga melahirkan etic pandangan peneliti tentang data.

Wawancara dilakukan dalam bentuk percakapan informal dengan menggunakan lembaran berisi garis-garis besar tentang apa yang ditanyakan, meliputi: 1] tahap-tahap industrialisasi 2] potensi social-ekonomi 3] kepemimpinan 4] potensi konflik 5] dinamika internal 6] dll.

Disamping itu, diperhitungkan juga beberapa aspek yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, dan keadaan sosial ekonomi mereka.

⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 162.

⁷Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation Methods* (Beverly Hills, 1987), h. 132. Jack R. Fraenkel & Norman E Wallen, *How to Design and Evaluative Research in Educations* (New York: Megrow Hill Inc, 1993), h. 384.

Termasuk dalam kategori ini adalah wawancara tentang sejarah hidup (*life histories*) yang dilakukan dengan meminta orang-orang sebagai subyek penelitian untuk menceritakan riwayat hidup mereka. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui motivasi tindakan aktor.⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan berbagai data yang terkait dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah profil perusahaan, kegiatan kerja, jurnal, surat-surat keterangan, dan lain-lain.⁹

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan ke dalam pola, tema, kategori dan interpretasi. Analisis ini bertujuan memberikan makna terhadap data, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep.¹⁰ Prosedur kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan kepada hal-hal yang penting

⁸ Marshall Catherine, *Designing Qualitative Research* 3rd, Edition, Sage Publication, (New Delhi: International Education and Professional Publisher, 1999), 120

⁹ Anselm Strauss & Juliet Carbin, *Basic Of Qualitative Research* (California: Sage Production, 1990), 17.

¹⁰ *Ibid.*, h. 268; Moeliong, *op. cit.*, h. 103.

dan berkaitan dengan masalah, yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek yang dibutuhkan.

b. Display Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul demikian banyak. Data yang bertumpuk menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian detailnya dipetakan dengan jelas.

c. Verifikasi Data

Data yang sudah dipolakan, difokuskan, dan disusun secara sistematis baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian di simpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Namun kesimpulan itu baru bersifat sementara saja dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih dalam (*grounded*), maka data lain yang baru dicari. Data baru ini bertugas melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan tentatif tadi.¹¹

Untuk menguji kredibilitas data, digunakan empat cara:

1). Derajat kepercayaan (*credibility*)

¹¹Matthew B. Miles; A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan Tjetjep Rohandi yang judulnya *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hh. 86, 105, 111, 116.

Kredibilitas ini merupakan konsep pengganti validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Kriteria kredibilitas ini berfungsi untuk melakukan penelaahan data secara akurat agar tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

Adapun teknik untuk menentukan kredibilitas penelitian ini adalah dengan memperpanjang masa observasi, pengamatan yang terus menerus, menganalisis kasus negatif dan triangulasi (*5 triangulation method*), yakni:

- a]. *Data triangulation*. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan data dari informan yang berbeda-beda. Jika informan yang berbeda-beda menjelaskan suatu hal dengan serupa, maka tingkat validitas kesimpulan dari data ini dianggap tinggi.
- b]. *Investigator triangulation*. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang berbeda. Dikatakan tingkat validitasnya tinggi jika lebih dari satu peneliti memperoleh informasi yang sama tentang objek yang diteliti.
- c]. *Theory triangulation*. Pengukuran dilakukan dengan menganalisis satu set data/informasi dengan perspektif teoritis yang berbeda-beda, biasanya disiplin ilmunya juga berbeda. Jika kesimpulan dari hasil analisa berbagai perspektif

sama, maka validitas dari hasil penelitian itu dianggap sudah baik.

d]. *Methodological triangulation*. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan metode yang berbeda, misalnya antara hasil penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Semakin sama hasil penelitian dengan metode yang berbeda, maka semakin valid hasil dari penelitian tersebut.

e]. *Environmental triangulation*. Pengukuran dengan cara ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian pada konteks-konteks yang berbeda. Pengertian konteks di sini bisa mengacu kepada waktu, tempat atau kompleksitas subjek yang diteliti.¹²

2). Keteralihan (*transferability*)

Konsep ini merupakan mengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh generalisasi. Dalam kualitatif, generalisasi tidak dipastikan. Ini bergantung pada pemakai, apakah akan diaplikasikan lagi atau tidak. Yang jelas, tidak akan terjadi situasi yang sama. Transferabilitas hanya melihat "kemiripan" sebagai kemungkinan terhadap situasi-

¹² Dedi Supriadi Adhuri, *Penelitian Kualitatif: Teknik Penelitian, Masalah Reliabilitas-Validitas dan Analisis Data*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI), Paper Pelatihan Penelitian Kualitatif, Solo, 13 Oktober 2007.

situasi yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk transferabilitas ini dilakukan dengan uraian rinci (*thick description*).

3). Kebergantungan (*dependability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep *reliability* dalam penelitian kuantitatif. *Reliability* tercapai bila alat ukur yang digunakan secara berulang-ulang, dan hasilnya *sama*. Dalam penelitian kualitatif, alat ukur bukan benda, melainkan manusia atau si peneliti itu sendiri. Teknik yang digunakan untuk mengukur kebergantungan adalah *auditing*, yaitu pemeriksaan data yang sudah dipolakan.

4). Kepastian (*confirmability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep "objektivitas" dalam penelitian kuantitatif. Bila pada kualitatif, objektivitas itu diukur melalui orang atau penelitiannya. Diakui bahwa peneliti itu memiliki pengalaman subjektif. Namun, bila pengalaman peneliti tersebut dapat disepakati oleh beberapa orang, maka pengalaman peneliti itu bisa dipandang objektif. Jadi persoalan objektivitas dan subjektivitas dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh seseorang.

6. *Penyimpulan*

Setelah melakukan kegiatan analisis, selanjutnya akan dilakukan penyimpulan dengan mengkonstruksi mata rantai logik antara berbagai evidensi, sehingga ditemukan mata rantai logic yang menghubungkan berbagai fenomena secara obyektif. Dari sinilah kesimpulan akan diambil.

BAB IV

Fluktuasi Industri Rokok di Era Pandemi

A. Gambaran Umum Kudus

Kota Kudus berada di sebelah Selatan kaki Gunung Muria, beriklim tropis, dan bertemperatur sedang, berkisar 18°–29°(C). Kota Kudus dibelah oleh sebuah sungai Kaligelis yang membentang dari arah utara ke selatan. Bentangan sungai di tengah kota merupakan model perkotaan lama. Kota-kota lama di pedalaman Jawa dibangun di tepi sungai yang memberi pasokan air, mobilitas dan perlindungan mereka. Bahkan seluruh kota lama di pedalaman Jawa pun dibangun di tepi sungai besar maupun kecil, seperti Gresik, Tuban, Lasem, Demak, Kudus, Jepara, Sunda Kelapa, Banten, Makassar, Banjarmasin, Malaka dan sebagainya. Pusat kota pada masa itu umumnya tersusun atas keraton, alun-alun, pasar dan permukiman yang dikelompokkan berdasarkan ras.

Hulu sungai Kaligelis berada di lereng Muria, sedangkan hilirnya bertemu dengan sungai serang. Pertemuan Kaligelis dengan Kali Serang mengingatkan kita pada catatan De Graaf dan Pigeaud yang menyebutkan bahwa yang menjadi penghubung antara Demak dan daerah pedalaman di Jawa Tengah ialah Sungai Serang, yang sekarang bermuara di Laut Jawa antara Demak dan Jepara. Sungai itu pada abad XVIII masih tetap dapat dilayari dengan perahu-perahu dagang yang agak kecil, setidaknya hingga Godong (sekarang wilayah Kabupaten Grobogan).

Kota-kota di sepanjang Pantai Utara Jawa, termasuk Kudus, mengalami perkembangan pesat karena adanya kemudahan jalur transportasi berupa jalan Daendels atau jalan Raya Pos. Jaringan Jalan Raya Pos dibangun ketika H.W. Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Batavia yang menghubungkan kota-kota pantai utara Jawa dari Anyer hingga Panarukan (1808 – 1811). Jalan Raya Pos menimbulkan dampak besar pada kota-kota yang dilewatinya. Pusat kotanya pun disusun mengikuti pola kota-kota lain di Jawa, dimana alun-alun sebagai muara semua jalan di kota itu dikelilingi oleh bangunan kabupaten di sisi utara, masjid di sisi barat dan pusat perdagangan (pasar) di sisi timur.

Berdasarkan perkembangannya, kota – kota yang terletak di Pantai Utara Jawa Tengah dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kota yang berkembang karena adanya aktivitas perdagangan atau pemerintahan yang menonjol, adanya aktivitas penyebaran agama Islam, dan karena adanya pelabuhan laut. Salah satu kota yang berkembang karena adanya aktivitas penyebaran agama Islam adalah Kota Kudus. Kota Kudus didirikan oleh seorang tokoh penyebar Islam Ja'far Shodik pada abad XVI, tepatnya 23 September 1549 M. Tahun berdirinya Kota Kudus didasarkan pada condro sengkolo yang ada di atas mihrab Masjid Menara (al-Aqsha). Pemberian nama Kudus yang diserap dari bahasa Arab 'quds' yang berarti suci, tidak seperti lazimnya kota-kota lain yang diilhami dari bahasa Jawa, semakin memperkuat sinyalemen bahwa Kudus lahir dalam konteks penyebaran agama Islam.

Ja'fah Shodiq adalah anak Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan, Blora. Sunan Kudus, yang bernama asli Amir sebelum akhirnya terkenal dengan nama Ja'far Shadiq, adalah imam kelima Masjid Demak pada akhir masa Sultan Trenggana dan pada awal masa Sultan Prawata. Sunan Kudus pindah dari Demak dan “mendirikan” Kota Kudus setelah ada perbedaan pendapat dengan Sultan Demak dalam penentuan tanggal awal bulan puasa.

Belum jelas kapan persisnya Jafar Shodiq tiba di Kudus. Pada waktu Jafar Shodiq menginjakkan kaki di Kudus, kota itu masih bernama Tajug. Menurut penuturan warga setempat, yang mula-mula mengembangkan Tajug adalah Kyai Telingsing (The Ling Sing), seorang Cina beragama Islam yang telah datang pada tahun 400-an. Dengan demikian, pemukiman itu sudah ada sebelum kedatangan Jafar Shodiq.

Model dakwah Ja'far Shodik adalah menyebarkan agama secara damai, berakulturasi dengan peradaban Hindu yang telah berkembang sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan larangan menyembelih sapi yang disucikan mereka. Selain itu, karena Sunan Kudus seorang yang *faqih*, maka masalah penentuan awal puasa menjadi perhatiannya. Untuk mengundang para jamaah ke masjid, Sunan Kudus menabuh beduk bertalu-talu. Setelah jamaah berkumpul di masjid, Sunan Kudus mengumumkan kapan persisnya hari pertama puasa. Acara ini kemudian di kenal dengan nama *bedhug Dhandang*. (Wiranto dan Sawariyanto, 2001).

Identitas kebudayaan Kudus adalah Bangunan Menara. Bangunan menara menghadap ke barat dan bentuknya menyerupai bangunan candi yang terbagi atas tiga bagian, yaitu: bagian kaki, tubuh, dan puncak. Kaki menara mempunyai denah berbentuk bujursangkar yang setiap sisinya berukuran 9,5 meter. Di kaki menara ini terdapat ornamen-ornamen yang menghiasi kaki menara berupa panil-panil segi empat panjang tanpa hiasan. Badan menara berdenah bujur sangkar dengan ukuran setiap sisinya 6,30 meter. Pada badan menara terdapat panil-panil segi empat polos, lingkaran dan palang Yunani yang diisi piring-piring porselin. Adapun puncak menara berupa ruangan mirip pendapa yang berlantaikan papan. Di atas bangunan tersebut diberi atap tumpang bertingkat dua, yang terbuat dari sirap. Pada bagian salah satu rangka atap menara terdapat inskripsi yang berbunyi *gapura rusak ewahing jagad*.

Menara Kudus dikelilingi oleh tembok di sisi timur, sebagian tembok keliling sisi utara dan selatan tembok yang terbuat dari bata. Areal kompleks Menara Kudus cukup luas terbagi 11 halaman, dengan batas tiap halaman adalah pagar dan gapura dari bata, baik yang berbentuk candi bentar maupun paduraksa. Di sebelah halaman menara terdapat tempat wudlu yang pada lubang pancuran terdapat ornament berbentuk kepala arca yang berjumlah delapan. Konon, delapan pancoran ini juga dalam rangka akulturasi dengan *Astasanghikanarga* dalam agama budha yang berjumlah delapan, yaitu: pengetahuan, keputusan, perkataan, perbuatan, penghidupan, daya usaha, meditasi dan kontemplasi.

Kurang lebih 100 M dari menara, membentang kaligelis yang dikemukakan di atas. Jika diperhatikan lebih seksama, keberadaan Kaligelis sekarang bukan sekedar sungai yang menyimpan cerita masa lalu, atau tempat bergantungnya sumber ekonomi sebagian warga Kudus sekarang. Lebih dari itu, Kaligelis juga menjadi simbol Kultur Kudus menjadi Kudus Kulon dan Kudus Wetan. Secara kultural sebutan wilayah barat (Jawa: kulon) mempunyai makna tersendiri di luar pembagian wilayah. Demikian pula dengan sebutan wilayah timur (Jawa: wetan). Kudus kulon menampilkan sistem budaya timur tengahan. Bangunannya dipenuhi dengan benteng-benteng tembok tinggi, situasi jalan sempit berliku-liku, bahkan kadang berakhir buntu. Di sebagian gang, orang tidak bisa melihat matahari, kecuali pada saat matahari tepat berada di atas kepala. Tembok-tembok yang dari luar kelihatan kumal itu ternyata menyimpan kemewahan di dalamnya. Jika kita memasuki kawasan balik tembok, akan kita dapatkan rumah-rumah yang bagus dengan tegel berwarna dan dipenuhi perabot rumah tangga yang tergolong mewah.

Di tengah halaman yang bersih itulah dibangun rumah adat Kudus yang biasanya bertegel coklat tua mengkilat. Rumah ini dibangun dengan lantai yang cukup tinggi, kira-kira satu meter dari permukaan tanah. Di dalam satu lingkungan benteng, biasanya dihuni beberapa kepala keluarga yang semuanya masih satu keturunan.

Terdapat cerita khusus mengenai tembok tinggi yang mengelilingi rumah-rumah penduduk Kudus kulon. Menurut salah seorang informan,

tujuan pembuatan tembok tinggi itu adalah untuk menjaga keamanan. Yakni keamanan bagi gadis-gadisnya. Karena dahulu kala, anak gadis di daerah ini harus dipingit dan tidak boleh keluar rumah. Tradisi pingitan itu kini memang sudah tidak berlaku, tetapi tradisi itu berkembang dalam bentuk kontrol sosial yang amat ketat. Untuk menjodohkan anaknya, mereka membangun sumur di depan rumah. Pada saat mengambil air itulah para pemuda memiliki peluang memilih calon pasangannya.

Situasi lingkungan tersebut berkaitan erat dengan lingkungan yang sudah padat dengan rumah-rumah penduduk. Selain itu juga karena mata pencaharian penduduk yang mayoritas pengusaha konfeksi atau sejenis industri rumah tangga lain seperti bordir dan tenun tangan (non-mesin). Karena itulah suasana kehidupan di kawasan Kudus kulon penuh dengan suasana kerja. Bila kita menelusuri gang-gang, baik padapagi ataupun sore, suasana kawasan ini tampak lengang, kecuali suara mesin jahit yang bersahut-sahutan dan berirama tanpa putus.

Suasana kerja tersebut akan segera berubah total ketika malam tiba, terutama antara waktu maghrib dan isya'. Pada saat-saat seperti inilah semua warga Kudus kulon mengaji. Mereka yang tidak mengaji, tidak membuat gaduh. Radio, tape dan televisi pada jam-jam tersebut dimatikan. Jika pada saat demikian ada orang yang keluar rumah, apalagi duduk bersantai, akan segera diperingatkan oleh orang tua mereka. Orang menganggap bahwa duduk santai atau keluar rumah tanpa tujuan yang jelas pada jam-jam pengajian itu tabu atau "saru".

Sementara itu, Kudus Wetan dipenuhi gedung pemerintahan, pabrik-pabrik dan bangunan yang bernuansa modern. Alun-alun simpang tujuh yang menjadi simbol pemerintahan kota berada disana. Di sebelah utara berdiri Kantor Kabupaten, sementara di sebelah barat berdiri Masjid Agung. Areal sebelah selatan dan timur didesain sebagai wilayah yang menggerakkan denyut nadi perekonomian kudus, wilayah pertokoan dan industri. Pusat perbelanjaan berdiri tepat di sebelah timur alun-alun. Di sepanjang jalan Ahmad Yani yang membentang ke arah selatan, kita akan menemukan berbagai ruko, bank, pusat Industri rokok Djarum dan bangunan lain yang bernuansa ekonomi. Sedangkan perjalanan ke arah timur kita akan disambut dengan perkantoran militer, kepolisian, Industri Rokok Nojorono dan berujung pada pasar Pasar Kliwon, pasar tradisional terbesar di antara 24 Pasar yang ada di Kudus.

Di era modern, dimana masalah perekonomian telah berkelindan dengan masalah politik, budaya, ideologi, bahkan juga menjamah ke tataran systems, processes, actors, dan events, maka Kudus Kudus harus memilih. Secara eksplisit, Kudus menyatakan dirinya sebagai kota industri berbasis religiusitas. Slogan yang dimunculkan adalah “kota religius-modern”.

Pilihan industri sebagai motor penggerak perekonomian warga Kudus secara ekonomi bisa dimaklumi. Sebab, selama ini sektor tersebut telah menjadi primadona. Mayoritas Penduduk Kudus yang menggantungkan hidupnya kepada sektor industri, baru kemudian disusul oleh sektor pertanian dan perdagangan. Industri yang berkembang di kudus antara lain

adalah rokok, jenang, gula merah, sirup, pakaian jadi, bordir, mebel kayu, alat pertanian, kertas/percetakan dan elektronik.

Industri-industri tersebut umumnya berada di perkotaan. Maka wajar jika kepadatan penduduk di kota menjadi lebih padat dibanding kecamatan lainnya. Dari 9 Kecamatan yang berada di wilayah yurisdiksinya, Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Kota dan kecamatan terendah kepadatannya adalah Kecamatan Undaan. Wilayah Kota dihuni lebih dari 8.700 orang perkilometer persegi, sementara Undaan hanya dihuni sekitar 900 orang.

Pilihan Kudus sebagai kota industri tidak hanya ditandai dengan pergeseran aktivitas ekonomi, tapi seluruh komponen yang terlibat juga bergeser, seperti tenaga kerja, modal, budaya, dan ideology. Bahkan pada gilirannya menjamah ke tataran systems, processes, actors, dan events. Fenomena ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Paling tidak terjadi pergeseran atau perubahan gaya hidup dari kultur santri ke kultur ambtenaar (Pegawai) sejak hadirnya pabrik gula. Konfigurasi kota Kudus menjadi tidak lagi santri sentris tetapi heterogen dan tentu saja berimplikasi munculnya persaingan-persaingan khususnya dalam dunia ekonomi. Inilah yang kemudian mencapai antiklimaks ketika terjadi huru-hara Cina tahun 1918 yang memakan korban cukup banyak. Fenomena ini kemudian terulang kembali pada kerusuhan anti Cina pada era delapan puluhan yang juga memakan korban harta benda tidak sedikit.

Munculnya fenomena industrialisasi di Kudus, di satu sisi memang cukup menggembirakan karena ketersediaan lapangan kerja yang kompetitif.

Akan tetapi, di sisi lain, sangat mengkhawatirkan karena industri yang mendominasi ternyata industri berskala besar yang rawan guncangan. Kecenderungan industrialisasi adalah berskala global. Sementara globalisasi ternyata disertai dengan fragmentasi yang nilainya kontras. Globalisasi mengarah pada globalism, spatial compression, universalism, homogeneity, dan convergency; sedangkan fragmentasi mengarah pada nationalism atau regionalism, spatial distension, separatism, heterogeneity, dan divergency.

Di era otonomi, tarik menarik antara globalisasi dan fragmentasi di atas akan semakin tampak. Kebijakan pembangunan ekonomi, bagaimanapun juga, membutuhkan investasi untuk pengembangan usaha berskala besar pada sub-sektor unggulan tertentu. Usaha-usaha besar dengan kemampuan modal yang tidak terbatas dari perusahaan nasional ataupun internasional pada gilirannya akan memunculkan persaingan (baca: kesenjangan) dengan usaha kecil dan menengah. Dua kemungkinan yang sama-sama mungkin terjadi adalah mereka akan tergulung habis atau akan dapat mampu bertahan dalam persaingan yang makin keras. Inilah problem besar yang sampai saat ini masih menjadi agenda warga Kudus yang dikenal ulet, rajin dan hemat.

Perilaku-perilaku tersebut merupakan modal dasar dalam berusaha. Sebagai ilustrasi, industri milik pribumi di Indonesia sampai tahun 1930-an belum banyak berarti. Berbeda dengan ini, Kudus tahun 1910-an telah terkenal sebagai pusat industri rokok kretek, dan pengusaha pribumi pada waktu itu sangat dominan.

Perilaku masyarakat Kudus yang ulet, yang rajin, dan hemat dalam berdagang dan berusaha merupakan fenomena yang sulit dibantah. Setidak-tidaknya sejak zaman penjajahan, mereka telah terkenal dengan perilaku tersebut, dan ini tentu saja berbeda jauh dengan perilaku ekonomi yang bersifat subsisten. Perilaku tersebut menarik bagi penguasa kolonial. Mereka sempat mempersoalkan pula mengapa masyarakat Kudus mempunyai perilaku ekonomi yang berbeda dari perilaku ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagi penguasa kolonial, masyarakat pribumi dilukiskan sebagai masyarakat yang miskin dan pemalas.

Menurut laporan A.D.A. de Kat Angelino, pejabat urusan Cina di Jakarta (Batavia) melukiskan bahwa keuletan, kerajinan, dan perilaku hemat yang ditunjukkan oleh masyarakat Kudus disebabkan oleh adanya percampuran darah Cina pada mereka. Benar tidaknya kesimpulan De Kat Angelino memang masih perlu diperdebatkan, karena keyakinan local sikap ulet tersebut merupakan warisan dari Sunan Kudus.

Di bidang perdagangan, masyarakat Kudus terkenal ulung sebagai pedagang antar kota. Mereka telah terbiasa memasarkan barang-barang dagangannya, seperti bordir, pakaian, batik, yang berkembang berhari-hari bahkan berminggu-minggu ke kota-kota lain, khususnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berkaitan dengan aktivitas ini, sering diketemukan perkampungan orang-orang Kudus di luar kota Kudus. Di pusat perbelanjaan di Malang, misalnya, dewasa ini dikenal dengan daerah Kudusan, dan jalan yang melintas di tempat itu disebut Jalan Kudusan. Konon, dahulu daerah

itu tempat memusatnya pedagang-pedagang yang berasal dari kota Kudus. Bahkan Pasar Kliwon sebagai sentra perdagangan masyarakat Kudus, beberapa waktu terakhir ini juga sudah mulai menjadi semacam pasar tujuan *kulakan* bagi para pedagang dari daerah lain. Para pedagang dari Jawa Timur dan sejumlah wilayah di Kalimantan, kini menjadikan Pasar Kliwon Kudus sebagai alternatif perkulakan. Dan mungkin Pasar Kliwon sudah mulai menggeser kedudukan Pasar Klewer Solo sebagai perkulakan garmen.

Dalam batas-batas tertentu, keuletan dan rajinnya orang-orang Kudus di bidang ekonomi dapat difahami dalam konteks apa yang disebut oleh Benjamin White (1976) sebagai occupational multiplicity. Diilhami oleh teori involusi Geertz (1963), White mempertanyakan apa yang terjadi pada masyarakat yang mata pencaharian utamanya pada sektor industri, atau usaha kecil apabila mereka dihadapkan pada fenomena peningkatan jumlah penduduk yang cepat dan kebutuhan ekonomi yang meningkat.

Proses occupational multiplicity adalah semacam proses “ke dalam”, sebagaimana proses involusi yang terjadi pada masyarakat petani, untuk menanggulangi kebutuhan ekonomi yang meningkat dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada untuk berproduksi. Tidak hanya kaum laki-laki yang harus bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga kaum wanitanya.

Fenomena ini memang bukanlah sesuatu yang terjadi hanya pada masyarakat Kudus saja, akan tetapi keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam menjalankan usaha yang dikembangkan dalam masyarakat Kudus

sangatlah dominan. Istri pedagang kain bordir misalnya, mempunyai keahlian membordir dan pembordir yang handal. Sistem borongan dalam pembuatan bungkus rokok kretek merupakan cara yang telah mentradisi di kalangan wanita penduduk Kudus. Peran tersebut dilakukan bersamaan dengan peran mereka yang lain. Demikian juga pengusaha atau pekerja laki-laki, mereka sering mempunyai peran ganda dalam berusaha. Ini semua menggambarkan tingkat keuletan dan kerajinan mereka.

Sedangkan stereotip perilaku hemat *wong Kudus*, seperti halnya stereotip umum yang populer secara luas adalah bahwa masyarakat nelayan itu boros dan masyarakat petani itu teliti, adalah sebuah perilaku ekonomi yang dibangun atas dasar pertimbangan ekonomi. Segalanya akan dilakukan setelah melalui proses seleksi berdasarkan pemahaman mereka tentang hemat. Hanya saja, hematnya *wong Kudus* menampilkan ciri-ciri yang dualistik, dimana dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak semata-mata digerakkan oleh “kebutuhan ekonomi”, tapi juga “kebutuhan sosial”. Hal ini karena di kalangan mereka juga terkenal suka bersedekah.

Pandangan tentang kebutuhan ekonomi yang penuh perhitungan dan kegemaran bersedekah yang lebih didominasi oleh pertimbangan sosial tersebut, tampaknya telah melembaga dan terpatrikan pada tata nilai yang berlaku. Artinya, kegiatan ekonomi, apapun bentuknya, akan dijalankan bila sesuai dengan tata nilai yang melembaga dalam masyarakat. Dari sudut pandang inilah dapat dimengerti mengapa perilaku yang materialistik mempunyai konotasi yang negatif dalam masyarakat. Dalam kerangka pikir

ini pula menjadi jelas mengapa sering muncul ungkapan di kalangan masyarakat "*wong mati ora nggowo bondo*" (Orang mati itu tidak membawa harta benda).

Karakteristik masyarakat Kudus tersebut diyakini berkaitan dengan diri Sunan Kudus. Dalam tradisi tersebut digambarkan bahwa selain sebagai seorang penyebar Islam yang faqih, Sunan Kudus dilukiskan pula sebagai seorang pedagang yang ulet. Tradisi lokal tersebut masih tetap hidup di kalangan masyarakat, dan figur Sunan yang patuh dalam beragama dan ulet dalam berdagang merupakan rujukan perilaku ekonomis dari masyarakat Kudus. Tidak aneh apabila masyarakat Kudus menjadi masyarakat santri-muslin yang taat sekaligus sebagai pedagang atau pengusaha yang ulung.

Penempatan Sunan Kudus dengan kearifan lokalnya sebagai suatu rujukan dalam berperilaku dan berusaha, dalam batas-batas tertentu, merupakan sumber nilai bagi masyarakat. Sehingga di Kudus, muslim yang taat dalam beribadah dan ulet dalam berdagang memiliki status yang tinggi di Masyarakat. Karena itu bisa dimengerti jika di Kudus kulon berkembang mitos larangan menikahkan anak gadisnya dengan pegawai negeri.

Nilai-nilai seperti ini, setelah melalui proses waktu yang cukup, melembaga dan yang pada akhirnya terlembagakan dalam tata nilai masyarakat Kudus, bersifat evaluatif, dan sekaligus merupakan bagian dari tradisi atau budaya masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena secara psikis seseorang cenderung memasukkan segala sesuatu yang berasal dari luar dirinya seperti simbol-simbol yang mencerminkan dunia di sekitarnya,

norma, budaya, kehidupan sosial, serta perilaku orang yang akrab dengannya ke dalam sistem gejala kejiwaannya. Proses internalisasi pengalaman ini kemudian mempengaruhinya dengan cara tertentu ketika memahami, merasa, berpikir dan berbuat.

Masih terkait dengan penempatan sunan Kudus sebagai figure sentral dalam masyarakat, di Kudus marak tradisi ziarah, terutama malam jum'at. Kata ziarah diserap dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti kunjungan, baik kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Namun secara teknis, kata ini menunjuk pada serangkaian aktivitas mengunjungi makam tertentu, seperti makam Nabi, Sahabat, auliya', pahlawan, orang tua, kerabat, dan lain-lain.

Praktek ziarah ke makam sebenarnya sudah ada sejak sebelum Islam datang. Yang menarik adalah penggunaan kata makam untuk menunjukkan tempat menguburkan mayat dalam Islam. Istilah bakunya adalah *maqbarah* yang dalam budaya jawa disebut kuburan. Sedangkan kata makam merupakan bahasa arab yang berarti tempat berdiri. Pengertian ini kongruen dengan kata astana yang terambil dari kata stha yang artinya juga berdiri. Pada zaman sebelum Islam, hanya raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa. Setelah dia meninggal, didirikanlah candi untuk menyimpan abu jenazahnya sebagai replika Mahameru [tempat bersemayamnya para dewa

Fenomena maraknya Ziarah akhir-akhir ini juga merupakan sisi lain industrialisasi. Dunia industri modern tidak bisa lagi memenuhi seluruh kebutuhan manusia, terutama kebutuhan spiritual, karena dunia industry

adalah dunia yang materialistik dan mekanistik, sehingga dirasakan sebagai proses dehumanisasi. Akhirnya, dalam melakoni hidup, mereka seringkali berhadapan dengan berbagai masalah pelik yang menjadikan rasionalitas mereka tidak berdaya sehingga menimbulkan kecemasan, ketakutan dan ketidaktenangan. Dalam situasi seperti ini, sebagian dari mereka bahkan ada yang kalap, melakukan tindakan yang tidak semestinya, melakukan kejahatan, lari pada minuman keras dan obat-obat terlarang, atau bunuh diri.

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan berziarah. Spiritualitas ziarah diyakini dapat menenangkan jiwa karena didalamnya terdapat terdapat hal-hal yang mendatangkan ketenangan.

B. Historisitas industri kretek di Kudus

Tradisi merokok sudah lama dikenal oleh masyarakat Jawa. Tercatat dalam Kisah Roro Mendut, seorang putri dari Pati yang dipersunting oleh Tumenggung Wiroguno-- salah seorang panglima perang Sultan Agung— awalnya adalah penjual rokok "klobot" (rokok kretek yang dibungkus dengan daun jangung kering) yang cukup terkenal karena rokok klobot Roro Mendut tidak dilinting menggunakan lem atau benang, melainkan dengan jilatan ludahnya. Inilah yang menyebabkan para lelaki tergila-gila.

Bukan hanya rakyatnya, sang raja Mataram-pun, Sultan Agung, yang memerintah pada 1613-1645, dikenal sebagai chain smoker (perokok berat). Utusan VOC untuk Mataram mencatat bahwa Susuhunan Mataram (Sultan Agung) merokok tembakau dengan menggunakan pipa perak selama audiensi dengan para pejabatnya.

Sejauh ini, pijakan sejarah awal tentang tembakau di Nusantara adalah mengutip dari naskah Jawa *Babad ing Sangkala* atau catatan mengenai kejadian-kejadian penting yang diperingati dalam Candra Sengkala "*Geni Mati Tumibeng Siti*" (1601 M) yang berbunyi: "*Kala seda Panembahan Syargi. Ing Kajenar pan anuggal warsa. Purwa sata sawiyose Milaning wong ngaudud*" (Waktu mendiang panembahan meninggal di gedung Kuning adalah bersamaan tahunnya dengan munculnya tembakau. Setelah itu, mulailah orang merokok). Dalam naskah ini istilah merokok menggunakan istilah "*ngudud*".

Jika dibandingkan dengan data sejarah, tahun 1601 Nusantara masih dalam genggamannya Portugis. Jika demikian adanya, maka tradisi merokok dengan bahan baku utama tembakau sebenarnya bukan tradisi lokal, tapi "oleh-oleh" bangsa Portugis yang datang ke Indonesia. Tanaman tembakau bukan asli Nusantara, tapi khas suatu daerah bernama Tobago, Meksiko, Amerika Utara. Pada tahun 1492, ketika Columbus menginjakkan kaki di Amerika, dia menemukan suku Caribia merokok untuk alasan medis. Kemudian dia membawa tembakau tersebut ke Spanyol dan dikembangkan di Eropa, untuk selanjutnya secara massif menyebar ke seluruh dunia melalui proyek kolonisasi, termasuk ke Indonesia. Istilah tembakau yang kita kenal sekarang lebih dekat kepada perkataan Portugis "*tabaco*" atau "*tumbaco*".

Sementara itu, istilah merokok baru dikenal belakangan, sekitar akhir abad ke 19. Istilah ini terpengaruh oleh tradisi orang Belanda yang

menyebut penghisap pipa dan cerutu dengan istilah “*ro’ken*”, “*een pijp ro’ken*”, dia menghisap sebuah pipa. Dalam naskah-naskah sastra Jawa yang berasal dari pertengahan abad ke-19 misalnya, istilah “*rokok*” ini tidak dijumpai. Sebagai gantinya justru muncul sebuah istilah asli Jawa, yakni “*eses*” atau “*ses*”, sebagaimana dijumpai dalam naskah “*Centhini*” yang disusun pada tahun 1814, atau istilah “*udud*” sebagaimana tersebut dalam naskah “*Babad Ing Sangkala*”.

Dalam kepercayaan tradisional, rokok digunakan untuk keperluan sesaji. Masyarakat daerah Banyumas menyebut rokok untuk keperluan sesaji ini dengan sebutan “*rokok sajen*”. Di beberapa daerah di Jawa Barat, sesaji rokok dikenal dalam kebiasaan “*nyuguh*” atau “*nyungsung*”. Di dunia perdukunan di daerah pesisir utara Jawa Tengah, rokok biasanya diserahkan kepada dukun yang bersangkutan, di samping sejumlah uang yang disebut “*tindh*”. Pemberian rokok kepada dukun ini sebenarnya hanya merupakan perlambang, seseorang telah datang kepada dukun dengan maksud untuk menanyakan sesuatu, sehingga dalam bahasa Jawa “*rokok*” alias “*moro takok*”, datang untuk bertanya.

Perkembangan selanjutnya, merokok kembali menemukan momentum sebagai obat, sebagaimana sejarah awalnya di suku Caribia, bukan lagi ‘gengsi’ para raja, atau ‘ubo rampe’ sesaji, setelah Haji Djamhari melakukan eksperimen. Pada suatu ketika, dia menderita penyakit dada (batuk asma) yang telah lama diidapnya. Untuk mengobati penyakitnya, ia mencoba memakai minyak cengkeh digosokkan ke bagian dada dan

punggunya. Ternyata kondisinya membaik sekalipun belum sembuh sama sekali. Selanjutnya ia mencoba mengunyah cengkeh ternyata hasilnya jauh lebih baik, hingga kemudian terlintas dalam pikirannya untuk memakai cengkeh sebagai obat. Caranya, cengkeh dirajang halus kemudian dicampur dengan tembakau yang dipakainya untuk merokok. Dengan cara ini ia bisa menghisap asapnya sampai masuk ke dalam paru-paru. Hasilnya seperti yang diharapkan, penyakit dadanya menjadi sembuh.

Metode Haji Djamhari ini dengan cepat menyebar di seluruh daerah sekitar tempat tinggalnya. Teman-teman dan kerabatnya beramai-ramai meminta rokok yang dihisapnya. Di luar dugaan, ternyata mereka malah merasakan kenikmatan lain. Akhirnya, permintaan "rokok obat" ini pun mengalir, dan diproduksi dalam jumlah besar. Rokok kretek Haji Djamhari dibungkus "klobot" (daun jagung kering), diikat dengan seutas tali, setiap ikat terdiri dari 10, tanpa selubung kemasan sama sekali. Rokok ikat ini akhirnya menjadi tiang pancang lahirnya industri rokok kretek di Kudus.

Pada awalnya warga Kudus menyebut jenis rokok baru hasil penemuan Haji Djamhari dengan sebutan "rokok cengkeh". Akan tetapi oleh karena jika dihisap rokok ini menimbulkan bunyi "*kretek-kretek*" seperti bunyi daun kering dibakar (dalam bahasa Jawa disebut "*kumretek*"), sebagai akibat pemakaian rajangan cengkeh untuk campuran tembakau, maka akhirnya jenis rokok ini dikenal dengan sebutan "rokok kretek".

Rokok retek kian dikenal. Namun tak begitu dengan penemunya. Djamarie diketahui meninggal pada 1890. Siapa dia dan asal-usulnya hingga

kini masih remang-remang. Hanya temuannya itu yang terus berkembang. Sepuluh tahun kemudian, penemuan Djamari menjadi dagangan memikat ditangan Nitisemito, perintis industri rokok di Kudus.

Nitisemito lahir dengan nama Rusdi dari pasangan Haji Sulaiman dan ibu Markanah, di desa Janggalan, salah satu desa di belahan Kudus Kulon, pada tahun 1863. Ayahnya, Haji Sulaiman adalah kepala desa janggalan.

Rusdi mengubah namanya menjadi Nitisemito ketika usianya sekitar 17 tahun. Saat itu, ia hendak merantau ke Malang, Jawa Timur untuk bekerja sebagai buruh jahit pakaian. Dengan bermodal ketekunan, walaupun ia buta huruf, usaha jahitannya cukup berkembang, bahkan ia mampu menjadi pengusaha konfeksi. Namun beberapa tahun kemudian, usaha ini kandas karena terlilit hutang. Nitisemito pulang kampung dan memulai usahanya membuat minyak kelapa. Entah mengapa, usaha ini juga berakhir dengan kegagalan.

Petualangan selanjutnya dilalui dengan berdagang kerbau. Namun, lagi-lagi usaha ini tidak cocok sehingga dihentikan. Kegagalan demi kegagalan akhirnya membawa Nitisemito menjadi kusir dokar sambil berdagang tembakau. Saat itulah dia berkenalan dengan Mbok Nasilah, pedagang rokok klobot di Kudus. Di warungnya, yang kini menjadi toko kain Fahrída di Jalan Sunan Kudus, Mbok Nasilah menyuguhkan rokoknya untuk para kusir yang sering mengunjungi warungnya, sebagai ganti *nginang* yang sering mengotori warung.

Seperti Haji Djamhari, mbok Nasilah meracik rokok dengan "*mengoplos*" cengkeh dalam rajangan tembakau. Kenikmatan rokok kretek lebih bergantung pada komposisi rajangan tembakau dan cengkih. Di Indonesia memang ada banyak cengkih, namun kadar minyaknya terlalu tinggi, sehingga menghasilkan aroma yang kurang sedap. Oleh karena itu kemudian dicampur lagi dengan cengkih impor dari Zanzibar dan Madagaskar. Campuran ini kemudian dilinting dengan *klobot* atau daun jagung kering dan diikat dengan benang. Rokok ini disukai oleh para kusir dokar dan pedagang keliling. Salah satu penggemarnya adalah Nitisemito yang saat itu menjadi kusir. Nitisemito lantas mempersunting Nasilah dan mengembangkan rokok kretek menjadi mata dagangan utama.

Usaha rokok Nitisemito maju pesat. Dia memberi label rokoknya dengan "*Rokok Tjap Kodok Mangan Ulo*" (Rokok Cap Kodok makan Ular), namun tidak membawa *hoki*, bahkan menjadi bahan tertawaan. Nitisemito kemudian menggantinya dengan merk "Soempil", kemudian diganti lagi dengan merk "Djeroek", dan yang terakhir mengganti dengan *Tjap Bulatan Tiga*. Lantaran gambar bulatan dalam kemasan mirip bola, merek ini kerap disebut *Bal Tiga*. Julukan ini akhirnya menjadi merek resmi dengan tambahan Nitisemito, *Tjap Bal Tiga H.M. Nitisemito*. Perusahaan Bal Tiga resmi berdiri pada 1914 di Desa Jati, Kudus.

Nitisemito memang pengusaha pribumi yang buta huruf, namun memiliki naluri bisnis yang kuat. Setelah 10 tahun beroperasi, Nitisemito mampu membangun paberik besar diatas lahan 6 hektare dengan kapasitas

produksi mencapai 10 juta batang/hari. Untuk mengembangkan usahanya, ia menyewa tenaga pembukuan asal Belanda. Langkah ini cukup dimengerti, karena ketika itu di Kudus telah berdiri 12 perusahaan rokok besar, 16 perusahaan menengah, dan tujuh pabrik rokok kecil (gurem). Pabrik besar itu antara lain adalah milik M. Atmowidjojo (merek Goenoeng Kedoe), H.M Muslich (merek Delima), H. Ali Asikin (merek Djangkar), Tjoa Khang Hay (merek Trio), dan M. Sirin (merek Garbis & Manggis).

Sebagai market leader, Nitisemito mampu memasarkan produknya hampir di semua kota di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan bahkan ke Negeri Belanda sendiri. Nitisemito boleh jadi belum membaca marketing mix, akan tetapi ia mempraktikkannya. Nitisemito mengerahkan sejumlah mobil untuk keperluan promosi dan sekaligus menerima penukaran pembungkus rokok hasil produksinya dengan hadiah yang telah disediakan, mulai dari gelas, piring, cangkir, arloji, sepeda, jam tembok dan lain sebagainya, yang semuanya diberi cap rokok “Bal Tiga”.

Ketika ada pasar malam, Nitisemito hampir pasti ikut meramaikannya dengan membuka stan pameran dengan hadiah tertentu. Konon, dalam stan tersebut pernah dia member hadiah berupa sedan baru. Bal tiga juga kerap menyelenggarakan pertunjukkan sandiwara keliling, yang dipakai untuk menyampaikan promosi rokok hasil produksinya. Yang paling ‘gila’, ia pernah menyewa pesawat terbang jenis Fokker seharga 200 gulden hanya untuk menyebarkan pamflet rokok hasil produksinya.

Bukan hanya kepada khalayak umum, Nitisemito dikenal sering membagikan hadiah berupa jam besar di masjid-masjid. Jam itu terbuat dari kayu dengan ornament klasik. Tingginya kira-kira 1,5 meter. Masjid yang pernah menerima hadiah itu antara lain masjid besar Magelang dan masjid Keraton Surakarta.

Antara tahun 1920-1930, perusahaan rokok “Bal Tiga” telah memiliki 15.000 orang buruh, dan 100 armada, yang terdiri dari bis untuk angkutan rokok, bis untuk memamerkan barang-barang hadiah (promosi), truk dan sedan. Nitisemito juga menjalin kerjasama dengan SPBU dan hotel tertentu di Indonesia, sehingga sales marketingnya tidak perlu membayar bensin atau uang penginapan, melainkan cukup dengan menunjukkan kartu tugas dari perusahaan dan menandatangani kertas bon. Pompa-pompa bensin dan hotel-hotel tersebut kemudian setiap bulan menagih uangnya pada agen rokok “Bal Tiga” terdekat.

Produk rokok juga menghadapi ancaman pembajakan. Pembungkus rokok palsu tersebut dibuat sedemikian rupa, sehingga pembeli akan sangat sulit membedakannya. Rokok palsu tersebut dibuat dari tembakau yang sudah rusak dan tidak diberi cengkeh sama sekali. Untuk mengatasinya, Nitisemito mengganti bungkus rokoknya dengan huruf timbul yang dicetak di Jepang. Dalam bungkus tersebut ada kode perusahaan yang tidak diketahui oleh orang luar.

Pada awal 1930-an, cengkih Zanzibar dan Madagaskar yang merupakan komponen utama rokok kretek harganya meningkat tajam.

Peningkatan ini dipicu oleh perang Dunia I dan kapasitas produksi yang menurun karena serangan hama. Mengingat konsumen rokok adalah kalangan menengah ke bawah, maka kenaikan harga merupakan satu hal yang harus dihindari. Jika tidak, maka competitor dari lembah Brantas akan menyerang. Oleh karena itu, pilihan pengusaha Kudus adalah dengan efisiensi. Ada beberapa model yang ditempuh oleh pengusaha. Pertama, dengan memperbanyak komponen cengkeh lokal. Cengkeh lokal dihasilkan di Indonesia timur, tepatnya di daratan Pulau Ternate, Tidore, Bacan, Motil dan Makian di Kepulauan Maluku. Langkah ini pernah ditempuh oleh para abon Nitisemito ketika upahnya diturunkan.

Untuk menghindari penurunan kualitas ini, Nitisemito melakukan pengawasan lebih ketat dengan membangun sebuah pabrik di atas tanah seluas 6 hektar. Pabrik tersebut terletak di Desa Jati Kudus, yaitu di pinggir jalan raya Kudus-Semarang. Gedung pabrik tersebut setelah Perang Dunia II pernah dipakai oleh bala tentara Jepang sebagai markas. Setelah kemerdekaan, pabrik tersebut pernah dipakai untuk asrama Batalyon 426, yang kemudian melakukan pemberontakan, sehingga bekas pabrik rokok “Bal Tiga” tersebut menjadi arena pertempuran dan mengalami banyak kerusakan.

Sejak pemindahan perusahaan dalam satu atap, ada pemandangan baru di Kota Kudus pada waktu pagi dan sore hari. Pada pagi hari di mana suasana masih gelap terlihat berduyun-duyun buruh rokok dari seluruh pelosok Kudus dan dari desa-desa berjalan beriringan menuju tempat kerja

ke pabrik rokok. Demikian pula pemandangan ini terlihat pada sore hari ketika buruh-buruh mulai meninggalkan pabrik ke rumah masing-masing.

Sayang sekali, kejayaan “Raja Kretek” Nitisemito akhirnya harus menyusut karena konflik antar anggota keluarga. Dari perselisihan intern keluarga ini, pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengetahui pembukuan ganda perusahaannya, suatu hal yang sebetulnya telah lazim baik di kalangan pribumi maupun non-pribumi. Pemerintah Hindia Belanda menuduh perusahaan Nitisemito tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar pada pemerintah, akibatnya rumah dan mobilnya disita untuk membayar pajak.

Namun demikian pemerintah Belanda memberikan pengampunan pada Nitisemito untuk tetap berproduksi. Tetapi sebagai akibat cuti besar perusahaannya selama beberapa bulan, ia melihat tidak sedikit dari para agennya telah menyeberang ke perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu, kebangkitan kembali perusahaan rokok “Bal Tiga” tidak berlangsung dengan mulus.

Faktor lain runtuhnya Nitisemito adalah datangnya bala tentara Jepang di Indonesia. Pada waktu itu seluruh aset Nitisemito dirampas oleh bala tentara Jepang. Armada-armada perusahaan Nitisemito dirampas untuk armada militer Jepang, dan gedung-gedung pabrik rokok dijadikan markas bala tentara Jepang.

Pada tahun 1944-1945 pemerintah Jepang memerintahkan Nitisemito untuk membuka kembali pabriknya. Namun usaha ini tidak

berlangsung lama, yaitu pada waktu Nitisemito mengawali lagi produksinya pada tahun 1947 usahanya mengalami kemacetan.

Nitisemito meninggal pada tahun 1953. Pada tahun itu juga pabriknya ditutup. Baru pada tahun 1962 di kalangan keturunannya timbul usaha meneruskan kembali produksi rokok. Namun usaha ini pun tidak berlangsung lama, hanya lebih kurang setahun saja. Setelah itu tidak ada lagi produk rokok “Bal Tiga” beredar di pasaran.

C. Tradisi Lokal Kudus

1. Tradisi Ekonomi Masyarakat Kudus : Ulet, Rajin, dan Hemat

Tradisi lokal masyarakat Kudus secara tersirat memuat pesan nilai-nilai tentang perilaku ulet, rajin, dan hemat. Perilaku-perilaku tersebut merupakan modal dasar dalam berusaha. Bukan mustahil apabila pengusaha-pengusaha Kudus berhasil dalam usahanya.¹

Di bidang perdagangan, masyarakat Kudus terkenal ulung sebagai pedagang antar kota. Mereka telah terbiasa memasarkan barang-barang dagangannya, seperti bordir, pakaian, batik, yang berkembang berhari-hari bahkan berminggu-minggu ke kota-kota lain, khususnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berkaitan dengan aktivitas ini, sering diketemukan perkampungan orang-orang Kudus di luar kota Kudus. Di pusat perbelanjaan di Malang, misalnya, dewasa ini dikenal dengan daerah

¹ Masyhuri, 2001, “Tradisi Ekonomi Santri Masyarakat Kudus Dalam Era Otonomi dan Globalisasi”, makalah pada Seminar “Tradisi Ekonomi Masyarakat Kudus : Antara Otonomi Daerah dan Globalisasi”, diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) dan Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN), Kudus, 31 Maret 2001.

Kudusan, dan jalan yang melintas di tempat itu disebut Jalan Kudusan. Konon, dahulu daerah itu tempat memusatnya pedagang-pedagang yang berasal dari kota Kudus.

Bahkan Pasar Kliwon sebagai sentra perdagangan masyarakat Kudus, beberapa waktu terakhir ini juga sudah mulai menjadi semacam pasar tujuan *kulakan* bagi para pedagang dari daerah lain. Para pedagang dari Jawa Timur dan sejumlah wilayah di Kalimantan, kini menjadikan Pasar Kliwon Kudus sebagai alternatif perkulakan. Dan mungkin Pasar Kliwon sudah mulai menggeser kedudukan Pasar Klewer Solo sebagai perkulakan garmen.

Dalam batas-batas tertentu, keuletan dan rajinnya orang-orang Kudus di bidang ekonomi dapat difahami dalam konteks apa yang disebut oleh Benjamin White (1976) sebagai *occupational multiplicity*.² Proses *occupational multiplicity* adalah semacam proses “ke dalam”, sebagaimana proses involusi yang terjadi pada masyarakat petani, untuk menanggulangi kebutuhan ekonomi yang meningkat dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada untuk memproduksi. Tidak hanya kaum laki-laki yang harus bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga kaum perempuannya.

Fenomena ini memang bukanlah fenomena yang berlaku, atau yang terjadi hanya pada masyarakat Kudus saja, akan tetapi keterlibatan

² Benjamin White, 1976. “Population, Involution, and Employment in Rural Java”, *Development and Change*, No.7.

seluruh anggota keluarga dalam menjalankan usaha yang dikembangkan dalam masyarakat Kudus sangatlah dominan. Istri pedagang kain bordir misalnya, mempunyai keahlian membordir dan pembordir yang handal. Sistem borongan dalam pembuatan bungkus rokok kretek merupakan cara yang telah mentradisi di kalangan perempuan penduduk Kudus. Peran tersebut dilakukan bersamaan dengan peran mereka yang lain. Demikian juga pengusaha atau pekerja laki-laki, mereka sering mempunyai peran ganda dalam berusaha. Ini semua menggambarkan tingkat keuletan dan kerajinan mereka.

Bagaimana dengan perilaku hemat masyarakat Kudus? Stereotip umum yang populer secara luas adalah bahwa masyarakat nelayan itu boros dalam membelanjakan uang yang mereka peroleh. Masyarakat petani sangat teliti dalam membelanjakan pendapatannya. Masyarakat Kudus yang mayoritas penduduknya sebagai pedagang dan pengusaha, terkenal dengan perilaku yang hemat. Perilaku tersebut, sebagaimana perilaku boros untuk masyarakat nelayan atau perilaku teliti pada masyarakat petani, tentunya berpengaruh besar pada perilaku ekonomi mereka secara keseluruhan. Segalanya akan dilakukan setelah melalui proses seleksi berdasarkan pemahaman mereka tentang hemat. Dari sini akan mudah difahami bila dikatakan bahwa segala tindakan akan lebih dipertimbangkan dari segi-segi kepentingan ekonomi. Karena itu, tidak aneh pula apabila sikap hemat masyarakat Kudus bisa dikemukakan

sebagai salah satu indikator dari perilaku ekonomi masyarakat Kudus yang lebih didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi murni.

Perilaku ekonomi masyarakat Kudus tampaknya berdasar pada tata nilai yang berbeda. Perilaku hemat yang menonjol pada masyarakat Kudus tentunya didasarkan pada suatu tata nilai yang menempatkan masalah ekonomi atau kekayaan mempunyai “arti” yang sangat tinggi. Perilaku ulet dalam berusaha, rajin dan berlaku hemat yang ada pada masyarakat Kudus merupakan manifestasi dari tata nilai yang hidup di kalangan mereka. Segala sesuatu tindakan ekonomi dalam sistem nilai seperti ini akan dipertimbangkan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Hanya dalam keadaan-keadaan khusus tertentu dan dengan alasan yang khusus pula mereka baru melakukan suatu tindakan ekonomi untuk lebih pada kepentingan sosial.

Perilaku yang hemat, ulet, dan rajin berusaha sehingga pertimbangan ekonomi lebih dominan dalam tindakan ekonomi mereka, merupakan corak perekonomian yang lebih dekat dengan perilaku masyarakat kapitalis. Tentu saja hal ini merupakan modal penting untuk mengembangkan diri sebagai pedangang atau pengusaha yang ulung. Mereka tentu saja mampu bereaksi secara tepat terhadap rangsangan-rangsangan ekonomi yang ada.

Karakteristik masyarakat Kudus tersebut diyakini berkaitan dengan diri Sunan Kudus. Dalam tradisi tersebut digambarkan bahwa selain sebagai seorang penyebar Islam yang *faqih*, Sunan Kudus

dilukiskan pula sebagai seorang pedagang yang ulet. Tradisi lokal tersebut masih tetap hidup di kalangan masyarakat, dan figur Sunan yang patuh dalam beragama dan ulet dalam berdagang merupakan rujukan perilaku ekonomis dari masyarakat Kudus. Tidak aneh apabila masyarakat Kudus menjadi masyarakat santri-muslim yang taat sekaligus sebagai pedagang atau pengusaha yang ulung.

Jika di runut basis teoritiknya, pola yang dikembangkan oleh Sunan Kudus ini berusmber dari pemahaman arifnya tentang prinsip ekonomi dalam al-Qur'an. Postulat al-Qur'an tentang sumber daya menyatakan bahwa Allah Maha Memiliki segalanya; Allah adalah pemilik manfaat dan mudarat; Allah juga yang memiliki rezeki untuk semua makhluk.

Proposisi ini merupakan antitesis dari postulat liberalis klasik yang menyatakan setiap orang memiliki dirinya sendiri. Secara hakiki, proposisi ini mengandung problem ontologis karena tidak mampu menjawab masalah krusial tentang asal dan tujuan (*sangkan-paran*) dari segala ciptaan yang ada di alam semesta. Postulasi al-Qur'an juga berbeda dengan prinsip aliran libertianisme yang menyatakan *dunia pada awalnya tidak dimiliki siapa pun*. Sebab, al-Qur'an meletakkan kepemilikan manusia dalam proporsi temporal. Postulat ini bermaksud agar manusia sebagai *homo socius and economicus* menyadari peran dan fungsinya berhadapan dengan Kuasa dan Pemilik Mutlak atas segala sesuatu.

Sumber daya yang disediakan oleh Allah di bumi ini sebenarnya sangat mencukupi untuk sekedar memenuhi kebutuhan (bedakan dengan: keinginan) makhluk hidup yang melata di atasnya, tidak terkecuali umat manusia. Oleh sebab itu, apabila dalam kenyataannya, banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan *darūri*-nya, apalagi yang *takmīli* atau *tahsīni*, itulah bukan karena persoalan *supply* yang terbatas melainkan lebih karena distribusi yang terampas. Keterampasan ini memang tidak terjadi secara langsung dari tangan-tangan yang berhak, akan tetapi, melalui tatanan sosial yang timpang. Di mana, yang kaya bisa terus memperbesar kekayaannya, sementara yang miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya.

Oleh sebab itu, adalah tugas manusia untuk menjadikan sumber daya menjadi merata. Ketersediaan sumber daya alam tidak ada manfaatnya bila manusia sendiri tidak produktif. Islam mengandaikan berbagai macam aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, perdagangan, industri, dan pekerjaan dalam berbagai profesi (*kasb*). Pekerja akan produktif jika ia memiliki etos kerja yang tercermin dalam *ikhtiyār*, yakni kebebasan manusia untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Akan tetapi, jika ada yang gagal, adalah kewajiban yang sukses untuk membantu. Bantuan inilah yang kemudian disebut sebagai pertimbangan social.

Penempatan Sunan Kudus dengan kearifan lokalnya sebagai suatu rujukan dalam berperilaku dan berusaha, dalam batas-batas tertentu,

merupakan sumber nilai bagi masyarakat. Sehingga di Kudus, muslim yang taat dalam beribadah dan ulet dalam berdagang memiliki status yang tinggi di Masyarakat. Karena itu bisa dimengerti jika di Kudus kulon berkembang mitos larangan menikahkan anak gadisnya dengan pegawai negeri.

Nilai-nilai seperti ini, setelah melalui proses waktu yang cukup, melembaga dan yang pada akhirnya terlembagakan dalam tata nilai masyarakat Kudus, bersifat evaluatif, dan sekaligus merupakan bagian dari tradisi atau budaya masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena secara psikis seseorang cenderung memasukkan segala sesuatu yang berasal dari luar dirinya seperti simbol-simbol yang mencerminkan dunia di sekitarnya, norma, budaya, kehidupan sosial, serta perilaku orang yang akrab dengannya ke dalam sistem gejala kejiwaannya. Proses internalisasi pengalaman ini kemudian mempengaruhinya dengan cara tertentu ketika memahami, merasa, berpikir dan berbuat.³

Tradisi lokal masyarakat Kudus yang merujuk kembali kepada figur Sunan Kudus merupakan modal dasar dalam berusaha sehingga bisa dikatakan pengusaha-pengusaha Kudus berhasil dalam usahanya. Sebagai ilustrasi, industri milik pribumi di Indonesia sampai tahun 1930-an belum banyak berarti. Berbeda dengan ini, Kudus tahun 1910-an telah terkenal

³Vinacke, *The Psychology of Thinking* (Toronto: Mc Graw Hill Book Company Inc, 1992),285.

sebagai pusat industri rokok kretek, dan pengusaha pribumi pada waktu itu sangat dominant.⁴

Perilaku masyarakat Kudus yang ulet, yang rajin, dan hemat dalam berdagang dan berusaha merupakan fenomena yang sulit dibantah.⁵ Setidak-tidaknya sejak zaman penjajahan, mereka telah terkenal dengan perilaku tersebut, dan ini tentu saja berbeda jauh dengan perilaku ekonomi yang bersifat subsisten. Perilaku tersebut menarik bagi penguasa kolonial. Mereka sempat mempersoalkan pula mengapa masyarakat Kudus mempunyai perilaku ekonomi yang berbeda dari perilaku ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagi penguasa kolonial, masyarakat pribumi dilukiskan sebagai masyarakat yang miskin dan pemalas.

Menurut laporan A.D.A. de Kat Angelino, pejabat urusan Cina di Jakarta (Batavia) melukiskan bahwa keuletan, kerajinan, dan perilaku hemat yang ditunjukkan oleh masyarakat Kudus disebabkan oleh adanya percampuran darah Cina pada mereka.⁶ Benar tidaknya kesimpulan De

⁴ Pada tahun 1939, derajat keswasembadaan produk rokok dan cerutu menempati posisi nomor 4 dan 5 di Indonesia. The Kian Wee, *Industrialisasi di Indonesia; Beberapa Kajian* (Jakarta: LP3ES, 1994), 16

⁵ Di bidang perdagangan, masyarakat Kudus terkenal ulung sebagai pedagang antar kota. Mereka telah terbiasa memasarkan barang-barang dagangannya, seperti bordir, pakaian, batik, yang berkembang berhari-hari bahkan berminggu-minggu ke kota-kota lain, khususnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berkaitan dengan aktivitas ini, sering diketemukan perkampungan orang-orang Kudus di luar kota Kudus. Di pusat perbelanjaan di Malang, misalnya, dewasa ini dikenal dengan daerah Kudus, dan jalan yang melintas di tempat itu disebut Jalan Kudus. Konon, dahulu daerah itu tempat memusatnya pedagang-pedagang yang berasal dari kota Kudus.

⁶ Masyhuri, "Tradisi Ekonomi Santri Masyarakat Kudus dalam Era Otonomi Dan Globalisasi", makalah Seminar "Tradisi Ekonomi Masyarakat Kudus : Antara Otonomi Daerah dan

Kat Angelino memang masih perlu diperdebatkan. Akan tetapi yang jelas masalah keuletan, kerajinan, dan perilaku hemat masyarakat Kudus telah dikenal oleh masyarakat luas, tidak saja pada tingkat lokal, tetapi bahkan sampai pada tingkat pusat.

Dalam batas-batas tertentu, keuletan dan rajinnya orang-orang Kudus di bidang ekonomi dapat difahami dalam konteks apa yang disebut oleh Benjamin White (1976) sebagai *occupational multiplicity*. Diilhami oleh teori involusi Geertz (1963), White mempertanyakan apa yang terjadi pada masyarakat yang mata pencaharian utamanya pada sektor industri, atau usaha kecil apabila mereka dihadapkan pada fenomena peningkatan jumlah penduduk yang cepat dan kebutuhan ekonomi yang meningkat.

Proses *occupational multiplicity* adalah semacam proses “ke dalam”, sebagaimana proses involusi yang terjadi pada masyarakat petani, untuk menanggulangi kebutuhan ekonomi yang meningkat dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada untuk berproduksi. Tidak hanya kaum laki-laki yang harus bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga kaum wanitanya. Fenomena ini memang bukanlah fenomena yang berlaku, atau yang terjadi hanya pada masyarakat Kudus saja, akan tetapi keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam menjalankan usaha yang dikembangkan dalam masyarakat Kudus sangatlah dominan. Istri pedagang kain bordir

Globalisasi” diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK), dan Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN) di Kudus tanggal 31 Maret 2001.

misalnya, mempunyai keahlian membordir dan pembordir yang handal. Sistem borongan dalam pembuatan bungkus rokok kretek merupakan cara yang telah mentradisi di kalangan wanita penduduk Kudus. Peran tersebut dilakukan bersamaan dengan peran mereka yang lain. Demikian juga pengusaha atau pekerja laki-laki, mereka sering mempunyai peran ganda dalam berusaha. Ini semua menggambarkan tingkat keuletan dan kerajinan mereka.⁷

2. Karakter *Wong Kudus* : Bersikap *Sak Titahe*, Bergaya *Maliter*⁸

Wong Kudus, bagi siapa saja yang mengenalnya, akan dipandang secara stereotipe sebagai sosok *gusjigang*, orang yang memenuhi kriteria *bagus*, *kaji* dan *dagang*. Tiga hal itu menjadi semacam ciri yang melekat dalam diri *wong Kudus*.

Penilaian itu tentu saja berasal dari dua sisi, yaitu di satu sisi merupakan pandangan internal *wong Kudus* guna identifikasi diri, sementara dari sisi lain merupakan hasil rekaman pandangan orang luar untuk membedakan *wong Kudus* dengan orang lain.

Untuk bisa disebut sebagai *wong Kudus*, seseorang harus memiliki perilaku dan penampilan fisik yang *bagus*, *bagus rupa* dan *bagus laku*. Begitu seseorang buruk lakunya, tentu ini akan berkibat panjang, paling tidak akan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap dirinya, dan pada

⁷ Masyhuri, *Tradisi*, 4

⁸ Hasyim Asy'ari, 2003, " *Wong Kudus* : Bersikap *Sak Titahe*, Bergaya *Maliter*", *Suara Merdeka*, 23 Juli 2003.

gilirannya akan merugikan usaha dagangnya. Jadi, menjaga “kebagusan” laku dan penampilan fisik seolah melekat pada diri *wong Kudus*.

Kesalehan beragama *wong Kudus*, salah satu ukuran yang digunakan adalah *kaji*. Mengapa *kaji* ? Barangkali ini merupakan simbolisasi bahwa seseorang yang sudah sampai pada taraf *kaji*, tentunya secara ideal sudah melewati berbagai tahapan sebelumnya yaitu syahadat, shalat, puasa dan zakat. Dan tentu saja secara ekonomi seorang *kaji* sudah masuk kategori mampu, karena ongkos naik haji terbilang tidak murah. Singkatnya, jadi *kaji* sudah Islam betulan. Mungkin ini salah satu sebab, mengapa jumlah jama’ah haji Kudus setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan.

Dagang bisa jadi merupakan identifikasi usaha ekonomi *wong Kudus* Menurut catatan statistik yang tersedia, lebih dari 90% *wong Kudus* bergerak di sektor swasta, baik di dunia industri pengolahan, perdagangan dan sektor jasa. Sisanya, tentu saja pegawai negeri. Dan diyakini pula, yang jadi pegawai negeri di Kudus pun ikut “berdagang”, sebagaimana lazimnya *wong Kudus*.

Semula pandangan itu sangat melekat bagi siapa pun yang mengaku sebagai *wong Kudus*. Bahasa sosiologinya, sudah terinternalisasi (*internalized*). Namun kini, agaknya pandangan *gusjigang* sebagai identifikasi diri sudah mulai memudar. Kalaupun stereotipe *gusjigang* terhadap *wong Kudus* masih ada, biasanya lebih kuat sorotan itu dari orang luar Kudus. Setidak-tidaknya, *wong Kudus* lebih tepat

disebut sebagai *wong swastanan*, yang hidupnya tidak begitu tergantung kepada pemerintah, namun lebih bersentuhan dengan “logika pasar”.

Sinyalemen ini kelihatan pada saat Gus Dur masih jadi Presiden. Suatu ketika ia cerita di sebuah forum di Singapura. Gus Dur menyebut bahwa krisis ekonomi yang dirasakan Indonesia ini sebenarnya hanya dirasakan sebagian kecil saja warga Indonesia, terutama pada konglomerat. Gus Dur secara tegas waktu itu menyebut bahwa *wong Kudus* itu antikrisis. *Wong Kudus* disebut-sebut oleh Gus Dur masih banyak punya simpanan uang di bawah bantal dan kasur.

Apa artinya ini? Sekali pun *wong Kudus* sangat erat bersentuhan dengan ekonomi pasar, walaupun pasar guncang, namun agaknya *wong Kudus* masih punya prinsip hidup yang erat dipegangi. Sadar atau tidak, *wong Kudus* senantiasa berpegang pada etika hidup “*sak titahe*”.

Etika di sini dimaknai sebagai “keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya”. Etika *sak titahe* ini menjadi pegangan dan sekaligus *guidance value* bagi *wong Kudus* dalam mengarungi hidupnya, terutama dalam menjalankan usahanya.

Kedengarannya ada nada *pasrah bongkokan* atau sikap fatalis pada etika *sak titahe* ini. Namun sesungguhnya tidak demikian. Etika *sak titahe* ini kalau dicari padanannya lebih mendekati pada konsep *tawakal* dalam Islam.

Banyak ulama berpendapat bahwa *tawakal* itu sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha keras. Jadi, sikap pasrah itu ada syaratnya, yaitu baru dilakukan setelah terlebih dahulu berusaha secara keras. Bukan sebaliknya, tidak pernah berusaha keras, namun hanya pasrah, itu bukan *tawakal* namanya.

Ada semacam kemampuan lokal *wong Kudus* untuk menginternalisasi konsep *tawakal* dalam Islam ke dalam etika *sak titahe*. Karena etika *sak titahe* ini identik dengan konsep *tawakal*, maka bila ada orang yang *ngaku-ngaku* bersikap pasrah namun sesungguhnya ia belum pernah berusaha keras, maka oleh *wong Kudus*, orang macam ini dijuluki *wong mbluboh*.

Nah, buah dari hasil usaha keras yang dipandu oleh etika *sak titahe*, *wong Kudus* akan menuai *bathi* yang kecukupan. Sebagai wujud rasa syukur atas hasil usahanya yang membuahkan, akan ditampilkan dalam bentuk penampilan fisik yang bagus. “*Maliter, cah*,” kata *wong Kudus*.

Bagi *wong Kudus*, penampilan *maliter* itu identik dengan pakaian yang bagus, kendaraan yang mulus, dan rumah yang bagus pula. Penampilan eksternal yang bagus ini lalu menjadi identik dengan banyaknya rejeki yang sedang dimilikinya. Kalau rejeki pas baik, maka akan diikuti dengan penampilan *maliter*.

Karena *maliter* ini berkaitan dengan penampilan fisik, tentu saja bergaya hidup *maliter* akhirnya juga harus mengikuti perkembangan

mode. Ambil saja contoh kendaraan. Silahkan cek ke kantor satu atap yang mengurus STNK dan BPKB kendaraan bermotor, orang pasti akan tercengang, melihat jumlah dan beragam merk kendaraan yang dimiliki *wong Kudus*. Atau tengok ke dealer sepeda motor dan mobil, betapa *wong Kudus* akan selalu mengikuti perkembangan mode berkendara begitu keluar seri terbaru sebuah produk.

Bergaya *maliter* akan menjadi pantangan dan disorot secara tajam, manakala gaya *maliter* itu hanya untuk pamer kekayaan saja. Sebaliknya, bergaya *maliter* akan dihormati sebagai salah satu simbol mensyukuri nikmat atas keberhasilan, dan mengukuhkan dirinya termasuk ke dalam kalangan *bagus* dalam kategori *gusjigang*.

Nampaknya, stereotipe *wong Kudus* yang *gusjigang* itu tidak begitu saja tercipta. Namun lebih dari itu, *wong Kudus* punya etika *sak titahe* sebagai pegangan hidup, dan tidak jarang pula yang bergaya hidup *maliter* sebagai konsekuensi keberhasilan usaha ekonominya. “*Maliter yo lah, ning urip kuwi mung sak titahe,*” barangkali begitu.

D. Peranan Tradisi local dalam menggerakkan industri kretek

Karakteristik masyarakat atau khususnya pengusaha-pengusaha Kudus yang ulet, rajin, hemat, dan perilaku ekonominya yang lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi murni merupakan modal dasar bagi mereka untuk menjadi pengusaha yang handal. Dengan dasar perilaku ekonomi tersebut dan dengan rangsangan yang tepat sebagaimana disinyalir

oleh Higgins di depan, mereka akan mampu mengembangkan usaha yang dilakukan sebagaimana kaum kapitalis mengembangkan usahanya.

sejarah mencatat, bahwa pada tahun 1900-an, saat Indonesia masih di bawah kolonial, di Jawa telah dibangun banyak sektor manufaktur modern yang mengolah komoditas primer, baik tanaman pertanian (terutama gula) maupun bahan-bahan mentah (minyak) yang berhubungan dengan industri mesin, logam besar, dan kebutuhan umum lainnya, termasuk barang konsumen dan bahan bangunan.

Menjelang pertengahan abad ke-19, Indonesia sudah terbuka terhadap penerapan teknologi tenaga uap. Pada awal 1880-an, mekanisasi industri gula di Jawa hampir lengkap. Pada akhir 1900, Surabaya (bukan Batavia) mempunyai peringkat setara dengan Kalkuta, Bombay, dan Osaka sebagai pusat industri terkemuka di Asia, diikuti oleh Singapura, Bangkok, Hongkong, Shanghai, dan Tokyo dalam skala sedang. Kota-kota pelabuhan utama merupakan pusat-pusat kegiatan manufaktur.

Sekalipun Thailand mempunyai pabrik gergaji dan beras, Malaysia mempunyai pengerukan timah, dan Filipina juga memiliki industri gula, namun tidak ada yang menyamai investasi industri gula di Jawa dalam hal pengangkutan serta infrastruktur pemeliharaannya. Di seluruh Asia, satu-satunya padanannya adalah industri pembuatan serat di Benggala dan pusat industrinya di Kalkuta. Bahkan Jepang-pun bukan merupakan perkecualian.

Akan tetapi, semua karis industri Indonesia itu menjadi tidak mampu berkitik ketika dunia dilanda krisis tahun 1930-an. Menghadapi kenyataan

merosotnya pendapatan dari pajak perdagangan luar negeri, pemerintah Hindia Belanda membebankan pajak 20% dari harga eceran untuk semua hasil tembakau pabrik. Sejak tahun 1932 semua bungkus rokok harus disegel “bandrol” yang menunjuk harga eceran.

Penerapan aturan ini menyebabkan kekhawatiran besar pada dunia industri kretek, sehingga menimbulkan oposisi besar dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat Koloni), terutama dari seorang anggota bangsa Indonesia, Wiboho Purbohadidjojo. Akhirnya, sebagai kompensasi, pemerintah semakin peduli terhadap persoalan industri, karena komoditas ekspor hasil pertanian sudah tidak dapat diandalkan lantaran harganya terlampau rendah.

Pemerintahan Hindia Belanda-pun semakin mengabaikan prinsip *laissez-faire*, dan melangkah ke transformasi struktural, yakni menggeser pertumbuhan sektor produksi dari semula mengandalkan sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan kemudian ke sektor jasa-jasa. Pilihan transformasi struktural ini dilakukan karena dipandang sektor primer tidak lagi mampu memberi nilai tambah (*value added*).

Pendekatan yang digunakan adalah dengan merangsang sektor industri yang sedang tumbuh dan memobilisasi sektor tradisional dalam perekonomian untuk melayani tugas industri kretek.

Langkah awal yang ditempuh pemerintahan Hindia-Belanda adalah dengan mensponsori penelitian tentang industri keretek, termasuk kondisi perburuhannya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk membendung laju industri kretek mesin dan mempertahankan pekerjaan dan pendapatan

penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dililit problem kemiskinan. Dalam undang undang dan peraturan perusahaan tentang pabrik rokok tahun 1935, di samping pajak diferensial yang telah di tingkatkan, pemerintah akhirnya menetapkan harga eceran minimum rokok “Putih” dan melarang penambahan produksi rokok buatan mesin tanpa persetujuan pemerintah.

Maksud langkah langkah tentunya untuk mengurangi kompetisi yang tidak seimbang dengan industry rokok “Putih”, terlebih saat itu sudah muncul problem monopoli dari Britis American Tobaccol. Dengan cara ini, diharapkan muncul stabilitas dalam pasar rokok, permintaan atas *klobot* yang dihasilkan petani Indonesia juga mampu bersaing dengan kertas impor, sekaligus ‘memaksa’ penggunaan tembakau yang di tanam di Indonesia oleh pabrik pabrik besar.

Usaha pemerintah Hindia Belanda dalam melindungi industry kretek dari persaingan dengan pabrik orang eropa tidak perlu diherankan. Sekalipun salah satu dari antara korporasi perdagangan besar Belanda (*Jacobson van den Berg*) memiliki pabrik rokok di Jakarta, bagian terbesar dari modal dalam industry rokok buatan mesin adalah milik Inggris–Amerika dan Belgia. Oleh karena itu, wajar bahwa *Java Gazette* (organ Kamar Dagang Inggris di Indonesia) memperlihatkan oposisi terhadap pajak yang berbeda. Pejabat–pejabat colonial ingin sekali mempertahankan pekerjaan dan menahan kemerosotan pendapatan penduduk asli sebagai akibat tidak adanya kepentingan usaha yang kuat dari Belanda untuk mengatasinya.

Dengan demikian, pada awal tahun 1930-an telah terlihat sejumlah perubahan yang bertalian dengan industry kretek. Benar bahwa industry kretek menjadi obyek penguasaan, penyelidikan dan perpajakan pemerintah, bahkan jauh lebih besar dari pada sebelumnya, tetapi juga mendapatkan perlindungan pemerintah dalam menghadapi kompetitornya. Bersama dengan produsen Lembah Brantas, pabrik rokok di Kudus semakin mendapat angin dan mampu mengembalikan pasarnya yang surut sejak 1920-an. Di tahun 1933, data Bea Cukai menyebutkan bahwa impor cengkeh pada pada tahun-tahun itu mencapai tingkat produksi tertinggi sebelum akhirnya meletus perang dunia II.

Selanjutnya, di zaman pendudukan jepang, muncul larangan impor cengkeh Zanzibar sehingga produksi menurun drastis. Untungnya, 'kue' regulasi Belanda menjelang perang menyebabkan persediaan cengkeh cukup banyak, dan bahan-bahan lainnya juga disimpan, sehingga sedikit dapat membantukeberlangsungan produksi. Akan tetapi, sudah bisa ditebak, formula ini pasti tidak tahan lama. Produksi-pun akhirnya macet karena kekurangan bahan baku. Tak ada rotan, akar-pun jadi. Itulah yang terjadi. Cengkeh lokal yang sebelumnya tidak disukai, akhirnya digunakan juga. Bahkan, tangkainya juga ikut dirajang. Beberapa pabrik malah membuat rokok tanpa berisi cengkeh.

Setelah pendudukan kembali Belanda di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, ada perubahan lagi dalam tata letak geografis industry yang merugikan Kudus. Walaupun pelabuhan pelabuhan utama jawa

dan sebagian besar pasar kretek di bagian barat dan timur Jawa berada di tangan Belanda, pada tahun 1946 – 1947, penguasaan Belanda di Kudus barulah pada agresi militer II akhir tahun 1948. Sehingga industri kretek di Semarang, Surabaya, dan Malang yang mendapat posisi beruntung ketika impor cengkeh secara besar-besaran di peroleh kembali pada tahun 1947 dan tahun 1948.

Mereka sanggup memproduksi dengan kualitas tinggi, sementara Kudus dipaksa tetap mempergunakan cengkeh dalam negeri dan bahan pengganti lainnya. Pada saat industri Kudus memperoleh jalan masuk mengimpor cengkeh pada tahun 1949, posisi keuangan lebih lemah dibanding saingannya di Semarang, Surabaya, dan Malang. Disamping saat itu hama merusak panen cengkeh Zanzibar, juga ada ledakan perang Korea, sehingga harga naik sangat tinggi. Akibatnya, industri rokok Kudus secara umum dihadapkan pada pilihan sulit, sehingga tak jarang diantara mereka gulung tikar. Hanya *Nojorono* yang tetap memperoleh posisi kuat dan mampu bertahan dengan baik.

Di era kemerdekaan, tepatnya tahun 1959, hasil cengkih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan rokok kretek di Jawa. Tidak ada alternatif lain kecuali import (dari Zanzibar dan Madagaskar). Agar cengkih tidak merupakan obyek spekulasi pengusaha rokok kretek di Jawa, pemerintah mengusahakan pembagian cengkih. Pembagian cengkih oleh pemerintah diserahkan kepada Yayasan Bahan Perindustrian berdasarkan besar kecilnya pajak pita cukai yang dibayarkan.

Menurut peraturan tentang pembagian cengkih tertanggal 4 Nopember 1959, setiap perusahaan rokok kretek yang membayar pajak pita cukai sebesar Rp 1.000,00 akan mendapat jatah cengkih dari pemerintah sebanyak 13 kg. Pembayaran lebih dari Rp.50.000,00 sampai dengan Rp.500.000,00 akan mendapat jatah cengkih 8 kg/ 1.000,00 nya. Lebih dari: Rp.500.000,00, hanya mendapat jatah cengkih 3 kg/ 1.000,00 nya.

Dari peraturan tersebut dapat dilihat, pengusaha rokok kretek yang lebih kecil hasil produksinya dan penggunaan pita cukainya, hanya mendapatkan sedikit sesuai dengan kemampuan produksinya. Bagi pengusaha rokok kretek yang membayar pajak pita cukai kurang dari Rp.1.000,00, pada tahun 1959 tidak mendapatkan jatah cengkih yang dikelola oleh Yayasan Bahan Perindustrian. Perusahaan Rokok Kretek tersebut akhirnya membeli cengkih di pasaran umum, yang harganya lebih mahal dari cengkih impor.

Kualitas cengkih hasil dalam negeri amat berlainan dengan kualitas cengkih impor. Cengkih impor sangat cocok untuk membuat rokok kretek, sebab rasanya gurih dan agak banyak mengkreteknya. Sedangkan untuk cengkih hasil dalam negeri, kurang cocok untuk membuat rokok kretek, karena mempunyai sifat keras, tidak ada rasa gurih dan sangat kurang mengkreteknya. Bagi konsumen rokok kretek sudah tentu memilih rokok kretek yang memakai cengkih impor, karena rasanya lebih gurih, enak, dan daya isap-nya lebih ringan.

Menjelang tahun 1950-1956, pemerintah sedang melakukan penghematan devisa, yang mengakibatkan turunnya penggunaan cengkih impor di perusahaan rokok kretek di Kudus. Kekurangan jatah cengkih impor diatasi dengan memakai cengkih hasil produksi dalam negeri. Cengkih dalam negeri dari daerah Manado, Maluku, Ambon, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Adanya pembatasan impor cengkih dan meningkatnya kebutuhan barang tersebut, tahun 1956 sampai tahun 1959, Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia (GAPRI) cabang Kudus, bekerja sama dengan Dinas Pertanian Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat mencoba menanam bibit cengkih Sansibar dan Madagaskar sebanyak 250 ribu pohon di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ijin dari Kementerian Pertanian Rakyat dan Kementerian Perindustrian Rakyat telah diperoleh. Tetapi Proyek ini baru dapat dilaksanakan menjelang tahun 1959.

Sebagai realisasi kelanjutan proyek tersebut, Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia cabang Kudus, mengirimkan 700 ribu bibit cengkih yang masih kecil ke seluruh Dinas Pertanian di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk dibagikan kepada petani yang memerlukannya, dengan syarat Dinas Pertanian Rakyat setempat dapat menyesuaikan dan memelihara bibit tersebut sampai berumur 1 tahun.

Di daerah Keresidenan Surakarta didirikan proyek realisasi bibit cengkih, yang bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia cabang Kudus. Proyek realisasi penanaman cengkih di Surakarta diberi nama Panitia Tanam Cengkih Surakarta (PPTS), didirikan tahun 1955. Hasil

pembentukan PPTS adalah tahun 1960 telah berhasil disebarkan bibit cengkih sebanyak 54.276 bibit cengkih ke berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sedangkan bahan tembakau, seluruh perusahaan rokok kretek di pulau Jawa menggunakan tembakau yang dihasilkan dari pulau Jawa sendiri. Tetapi, perusahaan rokok kretek dari daerah tertentu, belum tentu menggunakan tembakau yang dihasilkan dari daerahnya sendiri, sebab perusahaan rokok kretek tidak hanya mendatangkan satu jenis tembakau saja. Sebagai contoh di daerah Kudus ada yang menghasilkan tembakau, tetapi sebagian besar tembakau yang dihasilkannya tidak pernah digunakan oleh perusahaan rokok kretek di Kudus, sebab tembakau yang dihasilkan dari daerah Kudus rasanya terlalu pahit, dan aromanya tidak begitu harum, sedangkan untuk memproduksi rokok kretek, tembakau yang diperlukan adalah yang gurih dan harum. Rasa dan kualitas tembakau sangat dipengaruhi oleh iklim dan letak geografisnya. Oleh sebab itu, tembakau yang dihasilkan dari Kudus, hanya cocok untuk membuat rokok putih dan rokok klembak. Kebutuhan tembakau untuk perusahaan rokok kretek di Kudus, didatangkan dari daerah Kedu, Weleri, Bojonegoro, Mojokerto, Madura, dan Temanggung.

Kapasitas produksi rokok, sebagaimana pernyataan Menteri Muda Perindustrian Rakyat, di Surakarta, tanggal 31 Maret 1961, adalah 14-18 milyar rokok kretek, 16 milyar rokok putih. Berdasarkan data ini, maka pemakaian tembakau di daerah Kudus adalah sekitar 240 ribu ton pertahun.

Cara perusahaan rokok kretek di Kudus memperoleh tembakau dengan mengangkat seorang agen atau perwakilan perusahaan rokok kreteknya. Tidak jarang agen tembakau dari perusahaan rokok kretek, membeli tembakau yang masih muda dan belum dipanen dari petani tembakau. Cara pembelian seperti ini, biasanya berlaku untuk jenis tembakau Virginia dan tembakau Weleri. Sedang jenis tembakau lain, biasanya dijual dalam bentuk rajangan.

Perbedaan kualitas tembakau, di samping ditentukan oleh faktor alam, juga ditentukan oleh faktor perawatan. Faktor perawatan ini meliputi, perajangan, dan penyimpanan hal ini sangat mempengaruhi harga tembakau. Apabila perawatan tembakau tersebut bagus, harga tembakau pasti akan mahal.

Daerah jenis penghasil tembakau Virginia, adalah daerah Bojonegoro. Tembakau krosok Bojonegoro, mempunyai mutu paling baik untuk membuat rokok kretek. Penghasil tembakau krosok selain daerah Bojonegoro adalah daerah Wonosobo, esuki, Lumajang, dan Malang

Keresidenan Kedu terkenal sebagai penghasil tembakau garangan dan tembakau pepean. Tembakau garangan adalah tembakau yang dirawat dengan jalan digarang (dikeringkan) di atas api bakar. Sedangkan tembakau pepean adalah tembakau yang dirawat dengan jalan dikeringkan di panas sinar matahari.

Tembakau pepean dihasilkan di daerah yang rendah dan yang banyak sinar matahari. Daerah-daerah penghasil tembakau pepean adalah Purworejo, Magelang, Kebumen, dan Temanggung. Sedangkan daerah-daerah penghasil tembakau garangan adalah sebagian kecil daerah Temanggung, dan Wonosobo. Untuk daerah Wonosobo tembakau yang dihasilkannya adalah jenis tembakau garangan semua, sebab daerah Wonosobo adalah daerah dingin yang sering turun hujan.

Jika diperhatikan, warna tembakau ada tiga macam, yaitu kuning, hitam, dan merah. Jenis tembakau kuning rasanya ringan dan dikategorikan dalam jenis tembakau Virginia. Jenis tembakau tersebut digunakan oleh perusahaan rokok kretek di Kudus untuk memproduksi sigaret kretek.

Jenis tembakau merah dan hitam berserat kasar. Jenis tembakau ini mempunyai rasa yang keras sekali. Digunakan oleh perusahaan rokok kretek di Kudus untuk memproduksi rokok klobot spesial. Konsumen tembakau ini adalah perusahaan rokok kretek tua di daerah Kudus Kulon.

Sedangkan jenis tembakau merah kehitam-hitaman banyak digunakan oleh perusahaan rokok di Yogyakarta, dan sebagian kecil perusahaan rokok kretek di daerah Kudus untuk mencampur tembakau jenis Virginia yang akan dibuat rokok sigaret kretek. Sementara jenis tembakau kuning berserat halus, jenis tembakau ini mempunyai rasa keras. Digunakan perusahaan rokok kretek di daerah Kudus untuk memproduksi rokok klobot dan rokok kawung.

Perusahaan rokok kretek dari daerah Kudus lebih senang memakai tembakau dari daerah Keresidenan Kedu, hal ini disebabkan tembakau yang

dihasilkan dari daerah Keresidenan Kedu sangat cocok untuk memproduksi rokok kretek. Di samping harga tembakau dari daerah Keresidenan Kedu lebih murah apabila dibandingkan dengan jenis tembakau yang dihasilkan dari daerah lain, juga kualitasnya cukup bagus.

Selain cengkih dan tembakau, hal lain yang penting adalah kertas. Pada tahun 1939 penggunaan kertas ditaksir mencapai jumlah 85 ribu ton. Pada tahun 1950, jumlah pemakaiannya meningkat menjadi 120 ribu ton. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk, dan semakin bertambahnya perusahaan- perusahaan yang menggunakan kertas.

Perlu dicatat, bahwa tidak semua kertas dapat dipenuhi perusahaan dalam negeri. Produksi kertas Padalarang dan Leces tidak mampu memenuhi semua jenis kertas yang dibutuhkan perusahaan rokok kretek di Kudus. Kedua perusahaan tersebut hanya dapat memenuhi permintaan perusahaan rokok kretek di Kudus, untuk jenis kertas pengepak jenis pembungkus luar. Sisanya kertas untuk mencetak pita cukai yang dibuat oleh pemerintah, kertas papir, dan kertas pembungkus selop luar, harus didatangkan dari Inggris dan Jepang.

Disamping itu, kapasitas produksi kedua perusahaan itu hanya mencapai 6 ton per tahun, sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan kertas di Indonesia sebesar 5% saja. Pada tahun 1958 jumlah perusahaan kertas di Indonesia sudah mengalami kenaikan pesat, pada tahun 1958 jumlah perusahaan kertas sudah mencapai 17 perusahaan. Dengan adanya

peningkatan jumlah perusahaan kertas ini, kesulitan untuk memperoleh kertas relatif dapat diatasi, namun belum sepenuhnya.

Untuk itu, GAPRI cabang Kudus kemudian bekerja sama dengan pemerintah mendirikan perusahaan kertas di daerah Kudus sendiri. Rencana ini, dimulai tahun 1952 dan pada tahun 1958 baru dapat berproduksi. Perusahaan kertas ini adalah perusahaan kertas paling besar yang pernah didirikan oleh GAPRI dengan pemerintah. Perusahaan ini mempunyai lokasi strategis di tepi Kaligelis, dekat dengan kantor GAPRI cabang Kudus. Jenis kertas yang diproduksi adalah kertas HVS, kertas pembungkus, kertas berlapis kayu dan kertas koran.

Secara umum, Rokok dari Kudus yang dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Yang agak khas adalah di daerah Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat tidak menyukai rokok klobot atau rokok yang dibungkus daun jagung. Mereka lebih menyukai "daun kawung" dari pada daun jagung.

Untuk memudahkan aspek marketing, maka Tempat Pemasaran Rokok (TPR) didirikan oleh pengusaha rokok kretek. TPR diberi wewenang penuh oleh perusahaan untuk mengangkat pegawai, membeli alat-alat inventaris, dan mengatur langsung jalannya pemasaran, dengan mengkoordinir agen-agen di wilayah kekuasaannya. TPR diberi komisi perusahaan sebesar 2% dari barang yang terjual. Sedangkan agen mendapat komisi langsung dari perusahaan rokok kretek. Kunci keberhasilan pemasaran rokok kretek terletak pada kelincahan pegawai TPR dan agen

perusahaan. TPR dan agen dapat menjatuhkan perusahaan rokok kretek, dengan jalan menjual hasil produksi yang telah rusak kepasar bebas.

Bagaimana halnya mereka apabila dihadapkan dengan otonomi daerah dan globalisasi (persaingan bebas)? Apakah mereka akan tergulung habis oleh kapitalis besar yang tentu saja akan lebih berperan dalam masa globalisasi tersebut? Bahwa mereka akan dapat mampu bertahan dalam persaingan yang makin keras atau akan tergulung habis oleh modal besar, merupakan dua kemungkinan yang kedua-duanya dapat terjadi. Faktor penting yang barangkali akan ikut menentukan hidup matinya perekonomian, dan masyarakat Kudus antara lain adalah peran pasar dalam sistem perekonomian yang berlaku, dan tepat atau tidaknya peran pemerintah dalam merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada masa pemerintah Habibie, paradigma baru muncul dalam membangun perekonomian masyarakat Indonesia, yakni apa yang disebut dengan ekonomi kerakyatan (Masyhuri, 2000). Aspek penting dari pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pemihakan pemerintah pada pengembangan usaha kecil dan menengah yang makin besar, dan penekanan pada aspek pemerataan. Kecenderungan ini merupakan antitesa dari kebijaksanaan pemerintah sebelumnya yang menekankan pembangunan ekonomi pada pertumbuhan dan pengembangan usaha berskala besar sebagai *engine of growth*.

Kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan melalui pengembangan usaha berskala besar pada sub-sektor-

sub-sektor unggulan tertentu ternyata melahirkan apa yang disebut ekonomi konglomerasi, dan terkonsentrasinya penguasaan sektor-sektor ekonomi potensial pada kelompok tertentu. Para konglomerat tersebut ternyata mampu mengembangkan praktek-praktek oligopoli-oligopsani, dengan mengintegrasikan secara vertikal seluruh aktivitas usahanya mulai dari hulu sampai hilir. Struktur ekonomi yang tercipta sebagai akibatnya adalah struktur ekonomi yang bercirikan kesenjangan yang lebar antara usaha yang berskala besar dan usaha kecil, dan tidak adanya keterlibatan yang berarti antara keduanya (Glassburner, 1978). Kesenjangan antara usaha besar atau kecil seperti inilah barangkali yang akan terjadi saat globalisasi ekonomi. Dengan adanya globalisasi, usaha-usaha besar dengan kemampuan modal yang tidak terbatas, dari perusahaan nasional ataupun internasional akan dapat mengembangkan usahanya secara bebas.

Kecenderungan pada pembangunan ekonomi yang menekankan pada pemerataan dan ekonomi kerakyatan muncul setelah terbukti bahwa ekonomi konglomerasi tidak berdaya menghadapi krisis ekonomi yang terjadi. Sebaliknya dalam keadaan krisis tersebut ternyata benar bahwa sektor usaha kecil informal yang sering dilecehkan sebagai *shared poverty* justru dapat bertahan. Bahkan sektor tersebut merupakan penampung terakhir tenaga-tenaga kerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hanya saja belakangan ini kecenderungan kepada pembangunan ekonomi yang memihak rakyat banyak menghilang lagi gaungnya. Belum

jelas mengapa hal ini terjadi, tetapi tampaknya ada kaitannya dengan *political will* dari pemerintah.

Kemampuan ekonomi tradisional bagaimanapun unggulnya, termasuk tradisi ekonomi masyarakat Kudus, akan menghadapi tantangan yang sangat berat apabila pemihakan pemerintah kepada usaha kecil sebagaimana pemihakan pemerintah selama ini yang dilukiskan sebagai “pemihakan setengah hati” (Sadoko et.al, 1975). Mengapa demikian? Pengembangan usaha kecil pada tahap-tahap awal memang perlu pemihakan pemerintah yang tegas. Hampir di semua negara maju, seperti Amerika, Jepang, Taiwan, pemihakan pemerintah sangat jelas kepada sektor usaha kecil. Hal ini disadari sejak awal bahwa usaha yang berskala kecil dan menengah tidak akan tumbuh tanpa dukungan kebijaksanaan yang jelas. Alasannya, usaha kecil sulit tumbuh sendiri, karena masih merupakan “embrio” yang lemah dan perlu perlakuan yang khusus.

Dalam era otonomi daerah, perilaku elit lokal memegang peran penting dalam penciptaan situasi yang kondusif untuk pengembangan potensi ekonomi dari masyarakat. Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga perilaku elit lokal dalam hal ini sangat diperlukan. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pemerintahan selama Orde Baru bersifat sentralistik. Pelaksanaan otonomi daerah tentu saja merubah tata pemerintahan yang sentralistik tersebut. Masalahnya apakah pelaksanaan otonomi daerah mampu mendorong munculnya perekonomian daerah?

Dari hasil penelitian di sejumlah daerah terungkap bahwa pada tingkat realitas, implementasi otonomi daerah lebih banyak diwarnai oleh tawar-menawar dan koalisi antara elit lokal dan aktor-aktor tertentu dalam masyarakat. Kunci untuk memahami fenomena tersebut terletak pada apa yang disebut Hidayat (2000) sebagai *perilaku eksklusif* (lihat pula Bate, 1981). Perilaku seperti ini tentunya kurang kondusif untuk pengembangan usaha.

Perilaku eksklusif memiliki beberapa karakteristik, antara lain *pertama*, para elit lokal, khususnya para birokrat di daerah, cenderung memiliki apa yang disebut sebagai loyalitas tunggal yang lebih diberikan kepada atasan atau sesama elit daripada kepada masyarakat. Kendati dalam bentuk pernyataan dikatakan bahwa para birokrat adalah “abdi masyarakat dan negara”, namun dalam kenyataannya, mereka tidak lebih hanya sebagai abdi atasan dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan masyarakat banyak. *Kedua* adalah para birokrat di daerah lebih memposisikan dirinya sebagai penguasa otonom yang berhak menentukan nasib masyarakat daerah. Sebagai konsekuensi dari terbentuknya loyalitas tunggal di kalangan para elit, maka dapat difahami apabila mereka merasa bahwa keberadaannya lebih ditentukan oleh atasan dan jaringan antar elit, bukan ditentukan oleh masyarakat daerah.

Implikasi dari perilaku seperti ini terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah, antara lain, dalam setiap proses pengambilan kebijaksanaan, para elit lokal lebih memihak kepada kepentingan atasan dan

kepentingan sesama elit daripada kepentingan masyarakat daerah. Dengan demikian, pada hakekatnya, berbagai kebijaksanaan yang diambil tidak lebih hanya merupakan refleksi maksimal dari kepentingan atasan elit itu sendiri. Pemihakan pemerintah (daerah) yang sungguh-sungguh terhadap perekonomian rakyat dengan sendirinya sulit diharapkan, dan yang demikian ini tentunya kurang mendorong tumbuhnya potensi ekonomi masyarakat.

Perilaku eksklusif seperti di atas tentu tidak kondusif untuk mendukung tujuan akhir otonomi daerah. Untuk itu, perlu ada semacam transformasi menuju perilaku inklusif, yakni perilaku yang memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan perilaku eksklusif. Di antara karakteristik yang dimaksud adalah, *pertama*, para elit lokal (baca birokrat) harus memiliki apa yang disebut suatu loyalitas yang diberikan tidak saja kepada atasan dan sesama elit, tetapi juga kepada masyarakat. *Kedua*, para elit lokal harus lebih memosisikan keberadaan mereka sebagai pelayan masyarakat daerah, bukan sebagai “penguasa” otonomi di daerah.

Proses transformasi perilaku elit lokal tersebut tentu tidak berjalan dengan sendirinya. Transformasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain keinginan politik dari para elit lokal itu sendiri untuk melakukan perubahan. Yang lebih penting barangkali perlu adanya tekanan yang konsisten dan sistematis dari kalangan masyarakat dalam mendorong perubahan tersebut. Di sinilah kita sampai pada pentingnya fungsi kontrol sosial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

E. Fluktuasi Industri Kretek Di Era Pandemi

Pada awal 1970an, muncul ide ekonomi politik yang menyatakan bahwa masalah ekonomi (termasuk didalamnya industri rokok) tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Masalah politik, pemilikan sumber daya, kekuasaan dan distribusi, saling terkait dan mempengaruhi proses pembangunan. Akhirnya, mereka sampai pada dua kesimpulan utama.

Pertama, pertumbuhan dan pembangunan, sekalipun dua entitas yang berbeda, tetap merupakan proses-proses yang saling berkait. Pertumbuhan sama dengan peningkatan produksi dan keluaran aktual, sedangkan pembangunan dapat didefinisikan sebagai kapasitas berproduksi. Makna penting pembedaan ini adalah bahwa kapasitas bergantung pada struktur-struktur yang ada dalam suatu masyarakat; untuk meningkatkan kapasitas, struktur-struktur itu harus diubah lebih dulu.

Kedua, produksi dan distribusi berhubungan erat. Sebab, jenis produksi yang dipilih berikut cara pengorganisasiannya akan mempengaruhi siapakah yang mengambil manfaat dari peningkatan produktivitas tersebut. Karena cara-cara produksi yang berlainan mengakibatkan distribusi yang berbeda-beda, maka efek-efek ini menjadi tidak dapat diabaikan.

Di era 1980-an, dimana gelombang globalisasi menerjang seantero dunia, intensitas dan cakupannya menyentuh hampir seluruh sendi

kehidupan. Tidak hanya bidang ekonomi, bisnis, budaya, politik, ideologi, melainkan juga telah menjamah ke tataran *systems, processes, actors*, dan *events*, sehingga disana melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan.

Dengan agenda globalisasi ekonomi, maka tata dunia baru akan bertumpu pada kekuasaan modal dan pemilik modal. Dalam hal ini ada tiga agenda utama yaitu: (1) tataran tindakan, tata kekuasaan global yang bertumpu pada praktek bisnis raksasa lintas negara; (2) pelaku utamanya adalah perusahaan-perusahaan trans-nasional (*Multinational Corporation, MNCs*) ; dan (3) proses kultural ideologis yang dibawanya adalah konsumerisme. Praktek perdagangan bisnis trans-nasional didorong dan didukung oleh regulasi dan kesepakatan internasional yang kerap disebut sebagai 'aturan baru' dalam kerangka pasar bebas. Kesepakatan tersebut seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), WTO (*World Trade Organisation*), GATS (*General Agreement on Trade in Services*), TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Right*), TRIMs (*Trade Related Investment Measures*), AoA (*Agreement on Agriculture*) dan sebagainya.

Ada dua pilar utama yang menopang sistem ini, yaitu pasar uang (sistem perbankan) dan pasar modal. Kedua pilar (sektor finansial) inilah yang memungkinkan terjadinya proses akumulasi modal yang sangat pesat. Sedemikian pesatnya sehingga kian tak berkaitan langsung (decoupling) dengan perkembangan sektor real. Peningkatan kesejahteraan yang bersumber dari aktivitas di kedua pasar ini kian artifisial dan oleh karena itu mengakibatkan kerentanan di dalam perekonomian khususnya dan kehidupan

umat manusia umumnya. Hal ini disebabkan oleh pola eksploitasi yang telah melampaui batas-batas negara sebagai konsekuensi dari gelombang globalisasi.

Dalam konteks globalisasi ekonomi inilah term keunggulan komparatif dan kompetitif menjadi signifikan. Keunggulan komparatif didefinisikan sebagai bentuk keunggulan nilai produk suatu negara yang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproduksi barang. Sehingga, cara pandang ini lebih menekankan unsur "produktivitas" sebagai faktor pentingnya.

Dalam perkembangannya, pengertian itu relatif ketinggalan jaman akibat tidak bisa mengakomodasi dinamika perubahan yang terjadi. Kondisi aktual memperlihatkan, bahwa letak keunggulan relatif (komparatif) bukan hanya dikontribusikan oleh produktivitas tenaga kerja, melainkan juga faktor-faktor lain, seperti: tingkat upah, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur ekonomi dan nilai tukar mata uang (*kurs*). Jadi bisa saja, misalnya, produktivitas tenaga kerja suatu negara tinggi tetapi karena upah tenaga kerjanya juga relatif sangat besar, maka menjadi berbiaya mahal sehingga menjadi tidak unggul (*comparative disadvantage*).

Perusahaan rokok Kudus tidak bisa lari dari problem diatas. Dari hasil pergulatan mereka di era global, tentu saja ada yang bertahan, ada yang lebih maju, dan ada pula yang bangkrut. Sekarang, yang masih eksis antara lain adalah:

1. Nojorono—1932

Sebagai salah satu pabrik rokok tertua di Indonesia, Nojorono agak berbeda dari tipe pabrik lainnya. Pada umumnya pabrik rokok didirikan oleh satu orang dan dikembangkan sebagai usaha keluarga, namun Nojorono agak berbeda karena dikelola oleh tidak kurang dari lima keluarga yang tidak saling berhubungan keluarga.

Nojorono adalah merk usaha dari Tjoa Kang Hay yang semula merupakan *abon* dari pabrik rokok “Bal Tiga” Nitisemito. Karena pengalamannya dalam industri rokok, Tjoa Kang Hay memutuskan untuk bekerja sama dengan saudara-saudaranya, Tan Tjiep Siang dan Tan Kong Ping. Mereka memulai pabrik rokok sebagai trio yang memproduksi rokok klobot dengan merk “Astrokoro”, “555” dan “Kaki Tiga”. Belakangan Tjoa Kang Hay meninggalkan trio untuk mendirikan pabrik rokok baru bersama dua orang pengusaha Kudus lainnya, yaitu Ko Djie Siong dan Tan Djing Dhai. Perusahaan baru ini diberi nama Nojorono, di mana Ko Djie Siong dan Tan Djing Dhai yang menyediakan dana, dan Tjoa Kang Hay yang menjalankan produksinya.

Produk pertama dan paling sukses dari Nojorono adalah “Minak Djinggo”, karena ia menggunakan parafin dalam proses pembuatannya sehingga rokok kretek produksinya menjadi tahan air, dan “Minak Djinggo” menjadi merk pilihan bagi para pelaut dan para pekerja di perairan. Salah satu hal yang menjadikan Nojorono tetap bertahan adalah tetap menggunakan sistem kerja *abon*.

Sekarang ini produk unggulan Nojorono adalah “Class Mild” yang diproduksi sebanyak 5 milyar batang per tahun. Jumlah sebesar itu ternyata masih belum mencukupi kebutuhan pasar.

2. Djambu Bol—1937

Pabrik rokok “Djambu Bol” merupakan perusahaan rokok terbesar yang dimiliki dan dikelola oleh pribumi Indonesia setelah Nitisemito, sementara kebanyakan pabrik rokok besar dimiliki oleh keluarga Cina Indonesia.

Perusahaan ini dimulai di Kudus pada tahun 1937 oleh Haji Roesydi Ma’roef. Sebagaimana para pendiri perusahaan rokok pertama di Kudus, membuat rokok kretek bukanlah bisnis pertama Haji Ma’roef, karena sebelumnya dia telah memiliki perusahaan garmen sebelum menjadi pedagang tembakau. Karena pengalamannya melakukan jual beli tembakau inilah yang menjadikan dia tahu pertumbuhan kebutuhan rokok pada tahun 1930-an, dan mendorongnya untuk memulai membuat pabrik rokok dengan nama “Pabrik Rokok Djambu Bol”. Pada awalnya “Djambu Bol” hanya memiliki 20 orang pekerja dan hanya memproduksi rokok klobot.

Pada tahun 1942 saat penjajahan Jepang di Jawa, “Djambu Bol” menghentikan produksinya sampai dengan berakhirnya masa perang. Pada tahun 1949 “Djambu Bol” mengubah produksi rokok klobot dan mulai memproduksi rokok kretek bungkus kertas. Walaupun “Djambu Bol” sebagai salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia, namun ia tidak

terlalu dikenal di Jawa, kendatipun pabriknya berada di Kudus. Hal ini karena mayoritas penjualan “Djambu Bol” bukan di Jawa tetapi di Sumatera bagian Selatan.

Pada tahun 1952, seorang pedagang dari Lampung datang ke Kudus untuk memasarkan kretek di Lampung. Dia bertemu dengan Haji Ma’roef yang kemudian setuju untuk mensuplai rokok produk “Djambu Bol” kepada pedagang itu. Lima puluh tahun kemudian tercatat lebih dari 59% produk “Djambu Bol” terjual di Sumatera bagian Selatan.

Namun, pada tahun 2006, perusahaan ini mengalami masalah keuangan, sehingga terjadi PHK massal. Sampai saat ini, belum jelas nasib Djambu Bol kedepan.

3. Djarum—1951

“Djarum” merupakan pabrik rokok yang unik, karena pemilik yang sekarang ini tidak memiliki hubungan keluarga dengan pendirinya. Pada awalnya perusahaan rokok ini bernama “Djarum Gramophon” Pada tahun 1951 diakuisisi oleh Oei Wie Gwan dan kemudian dikenal dengan nama “Djarum”. Oei Wie Gwan yang lahir di Rembang ini semula mempekerjakan 70 orang buruh, dan sejak awal ia mengelola sendiri semua aspek produksi mulai dari mencampur tembakau, cengkeh dan saus, semua itu untuk menjaga kualitas kretek produksinya. Merk awal yang digunakan adalah “Djarum” dan “Kotak Ajaib”, kedua produk ini beredar hanya di kawasan Kudus. Dalam perkembangannya, produk kretek dipasarkan lebih luas di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Oei Wie Gwan meninggal pada tahun 1963, dan meninggalkan perusahaan kepada dua anaknya Budi dan Bambang. Untuk merealisasikan kebutuhan manajemen profesional, Budi dan Bambang menyewa manajer profesional, dan pada tahun 1970 “Djarum” mendirikan departemen penelitian dan pengembangan (*research and development department*) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan inovasi dalam produk-produk baru.

Walau pun pasar kretek dalam negeri masih terbuka lebar, namun “Djarum” mengembangkan potensi ekspor. Pada tahun 1972 “Djarum” mulai mengekspor produk kretek kepada pedagang rokok di penjuru dunia mulai dari Jepang sampai Belanda dan Amerika Serikat.

Sebagai hasilnya “Djarum” menjadi salah satu merk rokok terkenal di luar Indonesia. Pada pertengahan 1970-an “Djarum” segera merealisasikan keinginannya untuk berkompetisi dengan pabrik rokok “Bentoel” yang sudah menggunakan mesin. Produk rokok kretek mesin pertama kali adalah “Djarum Filter” yang diluncurkan pada tahun 1976, kemudian diikuti “Djarum Super” pada tahun 1981 yang dalam perkembangannya tercatat sebagai kretek filter terlaris.

Dari ratusan industri rokok di daerah Kudus, PT Djarum merupakan salah satu perusahaan rokok kretek terbesar. PT Djarum memiliki 76.000 karyawan dan 60.000 di antaranya bekerja di Sigaret Kretek Tangan (SKT). PT Djarum juga merupakan salah satu perusahaan rokok kretek yang mampu memberikan cukai terbesar bagi negara, yaitu

senilai Rp 17,4 milyar per hari. Total produksinya pada tahun 2006 adalah 126 juta batang per hari. Pada tahun itu pula, PT Djarum menguasai sekitar 19% pangsa pasar dari total industri rokok nasional.

Dalam perkembangan mutakhir industri rokok kretek di Kudus masih menjaga kepemilikannya sebagai modal dalam negeri. Berbeda dengan pabrik rokok H.M. Sampoerna yang telah diakuisisi oleh perusahaan rokok asal Amerika Serikat, PT Philip Morris Indonesia. Sejak 9 Maret 2005 PT Philip Morris telah memulai negosiasi pembelian saham Sampoerna. H.M Sampoerna pada tahun 2004 memproduksi 42.594 milyar batang atau menguasai 19,9% pangsa pasar, dan mempunyai omzet Rp 9 trilyun. Philip Morris produsen rokok Marlboro yang memiliki jaringan bisnis di 160 negara ini, berhasil menguasai 40% saham PT Handjaja Mandala Sampoerna Tbk. (H.M. Sampoerna). Bahkan pada 18 Mei 2005 Philip Moris Indonesia dikabarkan telah memiliki 97% saham PT H.M. Sampoerna Tbk.

Berbeda dengan itu, kelompok usaha Djarum yang dipimpin Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono kini menjadi pemegang saham utama PT Bank Central Asia Tbk. (BCA). Keduanya melalui Alarika menguasai 92,19% saham Farindo Investment Ltd. yang memiliki 50% saham BCA. Sebelum menjadi penguasa mayoritas BCA, grup Djarum memiliki dua bank yaitu Bank Huga dan Bank Huga Kita. Namun pada 13 Juli 2006 Bank Huga dan Bank Huga Kita dilego ke Rabbo Bank Group yang berkedudukan di Belanda. Bank Huga dan Bank

Haga Kita memiliki aset gabungan Rp 3,97 triliun per 31 Desember 2005. Kedua bank ini memiliki 78 kantor cabang yang tersebar di Jawa, Bali dan Sumatera bagian Selatan dengan 1.537 karyawan.

Robert Budi Hartono pemilik PT Djarum, oleh majalah *Globe Asia*, dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia tahun 2007 dengan kekayaan 4,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 37,8 triliun, satu tingkat di atas kekayaan Rachman Halim pemilik industri rokok Gudang Garam Kediri. Sebelumnya pada tahun 2006, majalah *Forbes* menobatkan Rachman Halim sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan 1,90 miliar dollar AS, dan menempatkan Budi Hartono pada posisi kedua dengan kekayaan 1,80 miliar dollar AS.⁹

PT Djarum, selain besar di industri rokok kretek, ia juga melakukan ekspansi usaha pada sektor lain. Pada sektor elektronik dia mempunyai perusahaan Polytron; sektor properti Djarum membangun WTC Mangga Dua, Pulo Gadung Trade Centre dan Grand Hotel Indonesia; sementara di sektor perbankan Djarum menguasai BCA.

Disamping Rokok terdapat Industri kertas PT. Pura Barutama dan elektronika PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron). Data pemerintah kabupaten kudu tahun 2008 menyebutkan bahwa di Kudus berdiri 86 perusahaan berskala besar dan sedang. Sedangkan industri kecil, jumlahnya lebih dari 10.000. Karir perusahaan-perusahaan

⁹ Sumber : "Terkaya di Indonesia", *Bisnis Indonesia*, Jumat, 31 Maret 2006.

tersebut tidak lagi bersifat lokal, namun telah menembus pasar internasional.

Industri lain yang cukup berkembang di Kudus adalah Jenang. Komoditi jenang (jenang Kudus) merupakan komoditi khas Kabupaten Kudus. Jumlah seluruh unit usaha ini sebanyak 45 buah. Jenang Kudus memiliki citarasa dan aroma khas yang tidak dimiliki oleh produk sejenis dari daerah lain, terbuat dari adonan utama tepung ketan, gula merah dan santan kelapa. Dalam perkembangannya, adonan ini dicampurkan dengan mentega, vanili, dan aroma rasa buah-buahan. Jenang juga cocok untuk dikonsumsi di segala kondisi cuaca baik musim hujan maupun kemarau. Daerah pemasaran meliputi pulau Jawa dan sebagian Sumatra dan Kalimantan.

Selain perusahaan jenang, di Kudus juga berkembang industri bordir. Bordir merupakan salah satu jenis kerajinan yang terbuat dari kain ukiran dari benang, sehingga kelihatan cantik dan menarik serta mempunyai nilai seni. Bordir mula-mula dimanfaatkan sebagai kegiatan sampingan ibu-ibu rumah tangga (home industri) dengan menggunakan peralatan sederhana dan terbatas pada kerudung. Seiring dengan kemajuan peralatan dan teknologi, hasil produksi kerajinan bordir mengalami perkembangan pesat. Selain busana muslim, dibuat pula taplak meja, tatakan gelas, seprei, sarung bantal / guling dan lain-lain.

Sentra kerajinan bordir Kabupaten Kudus terdapat di desa Rahtawu, Karangmalang, Padurenan, Getasrabi, desa Demangan,

Janggalan, Kajeksan, Damaran dan Langgar Dalem. Jumlah unit usaha kerajinan bordir sebanyak 243 unit dengan penyerapan tenaga kerja 4000 orang lebih.

Gayung sambut dengan industri bordir, maka lahir pula usaha pakaian jadi (konveksi), seperti kemeja, hem putra dan putri, pakaian anak-anak dan dewasa yang mempunyai kualitas tinggi. Jumlah unit usaha pakaian jadi sebanyak 1.381 unit yang menyerap tenaga kerja 15.000 orang lebih. Sentra industri konveksi di Kabupaten Kudus terdapat di desa Penganjaran, Pedawang, Ngembalrejo Kec.Bae dan desa Menawan, Karangmalang, Getasrabi Kecamatan Gebog

Di Kudus juga banyak bermunculan industri kerajinan kayu dan rotan. Industri ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jumlah unit usaha kerajinan kayu dan mebel sebanyak 324 unit yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.500 orang lebih. Dari jumlah itu, yang terbesar adalah PT Kudos yang mengolah rotan menjadi berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti, meja, kursi, almari, rak buku, hiasan dinding, dan lain-lain. Produk kerajinan ini telah menembus pasar ekspor di belahan amerika dan eropa.

Produksi khas unit usaha mebel adalah ukir-ukiran khas Kudus yang disebut dengan “Gebyok“. Ukiran ini mempunyai nilai seni dan artistik tinggi yang merupakan ciri khas rumah adat Kudus tempo dulu. Lokasi sentra meubel tersebar di 7 (Tujuh) Wilayah kecamatan,

meliputi: Kecamatan Gebog, Kaliwungu, Jekulo, Kota, Bae, dan Mejobo.

Yang sedang berkembang di Kudus adalah industri kreatif. Hal ini seiring dengan langgam pemerintah yang terus mengembangkan industri kreatif karena disamping memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, industri kreatif juga menciptakan iklim bisnis yang positif dan membangun citra serta identitas bangsa. Selain itu, industri kreatif berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa serta memberikan dampak sosial yang positif.

Industri kreatif mencakup 14 subsektor, antara lain, industri perangkat lunak (software), pasar barang seni, industri kerajinan, fesyen, advertising, desain, animasi, film, video dan fotografi, musik, serta permainan interaktif.

Industri kreatif yang ada di Kabupaten Kudus antara lain adalah kerajinan logam yang memproduksi miniatur becak, sepeda, kereta dan lain-lain. Sedangkan yang terbuat dari kayu adalah gebyok, joglo, ukir, dan kaligrafi.

Berdasarkan data di atas, maka cukup beralasan kiranya jika sektor industri menjadi gantungan hidup bagi masyarakat Kudus. Penduduk Kudus yang menggantungkan hidupnya kepada sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama (150.736 orang, atau 41.82%). Kemudian disusul oleh sektor pertanian pada urutan kedua

(58.269 orang, atau 16.17), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada rangking ketiga (53.070 orang, atau 14.72%).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan:

1. Historisitas industri kretek di Kudus

Tradisi merokok sudah lama dikenal oleh masyarakat Jawa. Tercatat dalam Kisah Roro Mendut, seorang putri dari Pati yang dipersunting oleh Tumenggung Wiroguno-- salah seorang panglima perang Sultan Agung— awalnya adalah penjual rokok "klobot" (rokok kretek yang dibungkus dengan daun jangung kering) yang cukup terkenal karena rokok klobot Roro Mendut tidak dilinting menggunakan lem atau benang, melainkan dengan jilatan ludahnya. Inilah yang menyebabkan para lelaki tergila-gila.

Pada awalnya warga Kudus menyebut jenis rokok baru hasil penemuan Haji Djamhari dengan sebutan "rokok cengkeh". Akan tetapi oleh karena jika dihisap rokok ini menimbulkan bunyi "*kretek-kretek*" seperti bunyi daun kering dibakar (dalam bahasa Jawa disebut "*kumretek*"), sebagai akibat pemakaian rajangan cengkeh untuk campuran tembakau, maka akhirnya jenis rokok ini dikenal dengan sebutan "rokok kretek".

Rokok retek kian dikenal. Namun tak begitu dengan penemunya. Djamari diketahui meninggal pada 1890. Siapa dia dan asal-usulnya hingga kini masih remang-remang. Hanya temuannya itu yang terus berkembang.

Sepuluh tahun kemudian, penemuan Djamari menjadi dagangan memikat ditangan Nitisemito, perintis industri rokok di Kudus.

2. Tradisi Lokal Kudus

Tradisi lokal masyarakat Kudus secara tersirat memuat pesan nilai-nilai tentang perilaku ulet, rajin, dan hemat. Perilaku-perilaku tersebut merupakan modal dasar dalam berusaha. Bukan mustahil apabila pengusaha-pengusaha Kudus berhasil dalam usahanya.¹

Di bidang perdagangan, masyarakat Kudus terkenal ulung sebagai pedagang antar kota. Mereka telah terbiasa memasarkan barang-barang dagangannya, seperti bordir, pakaian, batik, yang berkembang berhari-hari bahkan berminggu-minggu ke kota-kota lain, khususnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berkaitan dengan aktivitas ini, sering diketemukan perkampungan orang-orang Kudus di luar kota Kudus. Di pusat perbelanjaan di Malang, misalnya, dewasa ini dikenal dengan daerah Kudusan, dan jalan yang melintas di tempat itu disebut Jalan Kudusan. Konon, dahulu daerah itu tempat memusatnya pedagang-pedagang yang berasal dari kota Kudus.

Bahkan Pasar Kliwon sebagai sentra perdagangan masyarakat Kudus, beberapa waktu terakhir ini juga sudah mulai menjadi semacam pasar tujuan *kulakan* bagi para pedagang dari daerah lain. Para pedagang

¹ Masyhuri, 2001, "Tradisi Ekonomi Santri Masyarakat Kudus Dalam Era Otonomi dan Globalisasi", makalah pada Seminar "Tradisi Ekonomi Masyarakat Kudus : Antara Otonomi Daerah dan Globalisasi", diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) dan Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN), Kudus, 31 Maret 2001.

dari Jawa Timur dan sejumlah wilayah di Kalimantan, kini menjadikan Pasar Kliwon Kudus sebagai alternatif perkulakan. Dan mungkin Pasar Kliwon sudah mulai menggeser kedudukan Pasar Klewer Solo sebagai perkulakan garmen.

3. Fluktuasi Industri Kretek Di Era Pandemi

Pada awal 1970an, muncul ide ekonomi politik yang menyatakan bahwa masalah ekonomi (termasuk didalamnya industri rokok) tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Masalah politik, pemilikan sumber daya, kekuasaan dan distribusi, saling terkait dan mempengaruhi proses pembangunan. Akhirnya, mereka sampai pada dua kesimpulan utama.

Pertama, pertumbuhan dan pembangunan, sekalipun dua entitas yang berbeda, tetap merupakan proses-proses yang saling berkait. Pertumbuhan sama dengan peningkatan produksi dan keluaran aktual, sedangkan pembangunan dapat didefinisikan sebagai kapasitas berproduksi. Makna penting pembedaan ini adalah bahwa kapasitas bergantung pada struktur-struktur yang ada dalam suatu masyarakat; untuk meningkatkan kapasitas, struktur-struktur itu harus diubah lebih dulu.

Kedua, produksi dan distribusi berhubungan erat. Sebab, jenis produksi yang dipilih berikut cara pengorganisasiannya akan mempengaruhi siapakah yang mengambil manfaat dari peningkatan produktivitas tersebut. Karena cara-cara produksi yang berlainan

mengakibatkan distribusi yang berbeda-beda, maka efek-efek ini menjadi tidak dapat diabaikan.

Di era 1980-an, dimana gelombang globalisasi menerjang seantero dunia, intensitas dan cakupannya menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan. Tidak hanya bidang ekonomi, bisnis, budaya, politik, ideologi, melainkan juga telah menjamah ke tataran *systems, processes, actors, dan events*, sehingga disana melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan.

Dengan agenda globalisasi ekonomi, maka tata dunia baru akan bertumpu pada kekuasaan modal dan pemilik modal. Dalam hal ini ada tiga agenda utama yaitu: (1) tataran tindakan, tata kekuasaan global yang bertumpu pada praktek bisnis raksasa lintas negara; (2) pelaku utamanya adalah perusahaan-perusahaan trans-nasional (*Multinational Corporation, MNCs*) ; dan (3) proses kultural ideologis yang dibawanya adalah konsumerisme. Praktek perdagangan bisnis trans-nasional didorong dan didukung oleh regulasi dan kesepakatan internasional yang kerap disebut sebagai ‘aturan baru’ dalam kerangka pasar bebas. Kesepakatan tersebut seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), WTO (*World Trade Organisation*), GATS (*General Agreement on Trade in Services*), TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Right*), TRIMs (*Trade Related Investment Measures*), AoA (*Agreement on Agriculture*) dan sebagainya.

B. Saran

Pada dasarnya setiap orang diperintahkan untuk hidup seimbang. Antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan ma'isyah, antara masjid dan pasar, tidak berdiri secara diametral, namun berada dalam formasi keseimbangan, dimana masing-masing pihak bisa melakukan transaksi secara bebas tanpa intervensi dan hegemoni dari pihak manapun.

Kepada pemerintah, penulis menyarankan untuk memastikan sumber daya (*resources*) yang ada dikelola untuk sebesar-besarnya memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Negara harus mendistribusikan kekayaan negara secara merata kepada seluruh rakyat, sehingga tidak terjadi konsentrasi perputaran modal diantara mereka yang kaya saja. Pesantren harus diberi akses yang sama untuk mengolah sumber daya, memproduksi, mendistribusi, dan mengambil keuntungan dari modal tersebut, asal dilakukan secara fair, adil, dan tidak menimbulkan mafsadah, baik secara mikro ataupun makro.

Kepada pesantren penulis memberi catatan bahwa Pesantren sebagai bagian integral dari masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan mereka, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini merupakan tugas tambahan bagi pesantren yang sementara ini lebih terkonsentrasi pada bidang ilmu keagamaan. Walaupun dengan potensi *alakadarnya*, modal minimalis, akses terbatas, gerakan sporadis dan manajemen yang kurang terkoordinasi, hal tersebut bukan alasan bagi pesantren untuk mengelak dari tantangan bermetamorfosa ke peradaban masyarakat dengan berbagai dimensinya. Fungsi pesantren tidak hanya

sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*), sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resources*), tetapi sekaligus sebagai lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).

Agar proses tersebut tercapai, pesantren harus menanamkan ideologi pemberdayaan berbasis keberagamaan integratif yang menyatukan berbagai unsur perilaku secara sinergis, sehingga di dalamnya ada keterlibatan teologis (*theological involvement*), keterlibatan intelektual (*intellectual involvement*), keterlibatan ritual (*ritual involvement*), dan keterlibatan pengalaman (*experiential involvement*)

Setelah kultur jaringan teologi kemandirian berbasis keberagamaan intratif ter-*install*, barulah pesantren bisa serius melangkah pada kelengkapan instrument ekonominya, mulai perluasan akses pasar, permodalan, sumber daya produktif, prasarana sosial ekonomi, teknologi, peningkatan kualitas SDM, pemantapan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas bidang.